

Peran Bank Indonesia Menuju Indonesia 2025: Prahara, Sengsara, atau Nusantara Jaya?

Budi Hermana
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi - Universitas Gunadarma

PENDAHULUAN

Laporan *Millenium Development Goals* (MDG) untuk wilayah Asia Pasifik pada tahun 2006 menunjukkan bahwa Indonesia secara umum tergolong pada negara yang belum memuaskan dalam upaya pencapaian tujuan MDG jika dilihat dari pencapaian target 31 indikator yang telah disepakati oleh 189 negara yang menghadiri KTT Milenium PBB pada bulan September 2000. Indonesia dalam laporan tersebut secara tersurat disebutkan sebagai negara yang tergolong *falling further behind*, bersama dengan Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina. Sebuah pencapaian yang kurang enak didengar dan terasa pahit untuk sebuah bangsa dan negara yang telah berusia 61 tahun.

Indonesia tergolong *Early Achiever* untuk indikator pengurangan kemiskinan, tetapi angka kemiskinannya sendiri masih relatif tinggi dan menjadi salah satu masalah utama yang perlu memperoleh perhatian pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya. Predikat yang sama diperoleh untuk indikator laju penyelesaian sekolah dasar, partisipasi wanita untuk sekolah dasar dan menengah, angka kematian bayi dan balita, pengurangan penyakit TBC, perlindungan wilayah, dan pengurangan konsumsi CFC. Sedangkan untuk indikator pencegahan penyakit HIV tergolong *on the track*. Tetapi Indonesia masih tergolong *off the track-slow* untuk indikator pendaftaran pendidikan dasar, penyediaan air pedesaan, sanitasi perkotaan, dan sanitasi pedesaan. Bahkan untuk indikator anak-anak kurang gizi, siswa yang mencapai kelas 5 sekolah dasar, partisipasi wanita mengikuti sekolah tingkat atas, perlindungan hutan, emisi CO₂, dan penyediaan air untuk perkotaan tergolong *off the track-regressing*.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masalah utama Indonesia adalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kondisi tersebut memerlukan alternatif pemecahan masalah, atau dalam konteks jangka panjang, memerlukan rencana strategis. Dan berbicara rencana strategis pada dasarnya berbicara tentang masa depan yang lebih baik. Tetapi berbicara tentang masa depan juga tidak terlepas dari ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut harus bisa dikalkulasi agar berbagai skenario yang mungkin terjadi bisa diantisipasi mulai dari sekarang.

Perkembangan dunia saat ini sudah memasuki era globalisasi yang banyak mendapatkan perhatian, pembicaraan, atau pengkajian, baik yang *pro* maupun *kontra*. Walaupun istilah globalisasi sudah menjadi istilah yang umum dan populer saat ini, mungkin saja sebagian besar masyarakat Indonesia tidak peduli atau tidak mengerti tentang pengertian dan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Tetapi dalam pergaulan atau interaksi dengan negara-negara lain, Indonesia sudah sangat tergantung dan *terpaksa* mengikuti globalisasi. Keberhasilan dalam mengikuti arus tersebut bukan hanya sebatas terombang-ambing tanpa arah dengan biduk yang rentan sehingga mudah karam di tengah perjalanan.

Mengikuti globalisasi berarti mengikuti arus pergerakan pemikiran, orang, barang, jasa, dan modal yang telah mendorong terintegrasinya perekonomian dan masyarakat dunia. Tetapi sudah siapkah perekonomian dan masyarakat Indonesia untuk mengikuti dan memanfaatkan arus tersebut sampai tahun 2025? Sayangnya posisi Indonesia saat ini mempunyai daya saing di era globalisasi yang tergolong rendah. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* pada tahun 2006 posisi daya saing Indonesia berada pada urutan 50 diantara 125 negara. Posisi tersebut memang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada posisi ke-69 dari 116 negara. Terlepas dari apakah peningkatan daya saing tersebut adalah nyata atau dirasakan oleh masyarakat Indonesia, peningkatan daya saing nasional memang merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapi globalisasi.

Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, globalisasi memang harus dihadapi. Lalu bagaimana masa depan Indonesia sendiri pada masa yang akan datang? Haruskah kita pesimis jika melihat bagaimana posisi Indonesia di lingkungan global saat ini? Atau justru bersikap optimis jika kita bisa memanfaatkan berbagai kekuatan yang dimiliki bangsa dan negara? Terlepas dari sikap pesimis atau optimis, Indonesia sebagai negara dan bangsa harus tetap berdiri dan harus mempunyai keberanian untuk menghadapi masa depan. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Pada bagian awal akan dibahas bagaimana posisi Indonesia dalam lingkungan global dan hubungannya dengan beberapa indikator perekonomian. Tahap diagnosa tersebut dilengkapi dengan prediksi terhadap kondisi dunia dan Indonesia pada tahun 2025, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi. Bagian terakhir adalah apa dan bagaimana Bank Indonesia bisa berperan dalam mewujudkan visi Indonesia 2025.

POSISI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI: *STRATEGIC ISSUES*

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam lingkungan global yang sudah mengarah ke era informasi dan perdagangan bebas. Hal ini bisa dilihat dari indikator seperti *Corruption Perception Index*, *Environmental Sustainability Index*, *Network Readiness Index*, *Human Development Index*, *Knowledge Based Economy Index*, yang merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana posisi sebuah negara dalam lingkungan global, termasuk *Global Competitiveness Index* yang merupakan ukuran komposit tingkat daya nasional dan pencapaian *MDG goals*. Selain itu perkembangan terkini Indonesia sendiri yang relatif baru pulih- kalau tidak bisa dikatakan dalam kondisi *rawat jalan*- masih dihantui dengan angka kemiskinan, pergolakan sosial, dan masalah penegakan hukum. Padahal berbagai indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran keberhasilan atau prestasi sebuah negara atau pemerintahan dalam lingkungan global dewasa ini. Dan indikator-indikator tersebut merupakan *strategic issues* yang harus dicarikan solusinya agar Indonesia Raya dapat berkibar di era globalisasi.

2.1. Kemiskinan dan Masalah Kependudukan

Globalization increases average real incomes in all countries, but within countries the gains are shared unequally and some may lose
Deardorff and Stern (2000)

Salah satu pemikiran dari pihak yang anti-globalisasi, khususnya untuk perdagangan bebas adalah eksploitasi negara maju terhadap negara berkembang atau miskin. Dampaknya adalah adanya ketidakadilan ekonomi dengan semakin banyaknya masyarakat miskin di negara-negara yang relatif belum siap menghadapi globalisasi. Standar kehidupan memang secara signifikan telah meningkat, tetapi laju peningkatannya lebih besar pada negara-negara maju. Negara-negara berkembang atau terbelakang justru menunjukkan peningkatan angka kemiskinan. Menurut angka BPS, angka kemiskinan Indonesia sendiri tercatat sebesar 17.5 persen.

Kita tidak bisa menyalahkan negara lain atau globalisasi sepenuhnya sebagai penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia, lalu berusaha untuk mengisolasi dari lingkungan global. IMF menyatakan bahwa negara dengan pendapatan rendah belum bisa cepat bergabung dengan ekonomi global seperti negara maju lebih disebabkan kebijakan yang mereka pilih atau faktor lain yang diluar kontrol mereka. Tetapi terlepas dari pernyataan

lembaga internasional tersebut benar atau tidak, Indonesia harus membuat kebijakan atau program perbaikan yang salah satunya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Masalah kemiskinan dan kependudukan memang telah menjadi masalah utama dalam globalisasi. Teori Maltus tentang berlakunya deret ukur untuk penambahan jumlah penduduk tetapi deret hitung untuk penyediaan pangan menjadi relevan disini. Apakah dunia pada tahun 2025 masih bisa menyediakan standar hidup yang layak untuk penduduk dunia, yang sampai saat ini sudah mencapai 6,5 Milyar. Para ahli demografi PBB memperkirakan jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 berkisar antara 7,5 sampai 8,3 milyar (Population Action International, 2006). Lembaga Demografi Universitas Indonesia memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 273 juta pada tahun 2025 dengan pertumbuhan penduduk di bawah 1.5 persen. Dan Indonesia sendiri tergolong negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia yaitu sebesar 200 juta lebih, dan menurut BPS Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen).

2.2. Transparansi dan *Good Corporate Governance*

Corruption is a source of international macroeconomy instability. Corruption may hinder a country's ability to adsorb the benefits of globalization.....

Shang-Jin Wei (2001)

Salah satu agenda utama Indonesia adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Agenda tersebut sejauh ini sudah menjadi kebijakan pemerintah tetapi di tingkat implementasinya banyak pengamat atau lembaga internasional menilai program tersebut masih jalan di tempat. Salah satu ukuran yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional terhadap korupsi di Indonesia adalah *corruption perception index*.

Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa pada tahun 2006 Indonesia berada pada posisi 130 dari 163 negara. Posisi tersebut jauh lebih buruk dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang berturut-turut berada pada posisi 5, 44, dan 63. Sebuah angka yang mengkhawatirkan bagi sebuah negara yang dulu terkenal dengan istilah “zamrud di katulistiwa”. Walaupun pemerintah sudah berkomitmen untuk memberantas KKN, tetapi perkembangannya belum bisa dikatakan berhasil. Perkembangan CPI Indonesia dari tahun 2001 sampai 2006 serta perbandingan nilai CPI Indonesia dengan negara lain dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Banyak yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya dan bersifat struktural. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan perubahan institusional dan pemerintahan. Mengutip presentasi laporan MDG wilayah asia pasifik untuk tahun 2005,

perubahan struktural untuk meningkatkan kualitas pemerintahan mencakup keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas untuk mengurangi korupsi. Di tingkat konseptual, rasanya ketiga prinsip tersebut di atas sudah dipahami oleh pemerintah, dan telah dituangkan dalam berbagai program atau kebijakan yang terkait dengan pemberantasan KKN, mulai dari Tap MPR RI nomor VIII/MPR/2001 tentang pemberantasan dan pencegahan KKN sampai UU Nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan KPK.



Sumber: <http://www.transparency.org> (diolah)

2.3. Modal Sumber Daya Manusia dan *Knowledge Based Economy*

Growth in living standards springs from the accumulation of physical capital (investment) and human capital (labor), and through advances in technology

International Monetary Fund (2002)

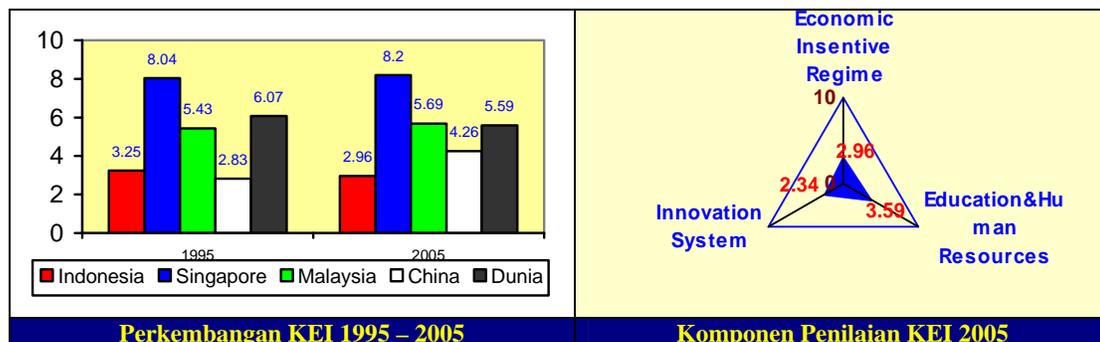
Berbicara mengenai kualitas SDM maka kita berbicara mengenai pendidikan, ketrampilan, beserta berbagai sisi psikologis manusia yang mempengaruhinya dalam bekerja. Berbicara mengenai pendidikan dan ketrampilan maka akhirnya kita berbicara tentang pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, dalam hal tulisan ini adalah wawasan global. Menurut Cuganesan (2005), modal SDM atau kompetensi tenaga kerja berkaitan dengan ketrampilan, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman dan karakteristik nilai dari tenaga. Jadi kesimpulannya adalah aspek pendidikan harus menjadi prioritas Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM. Lalu bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam aspek pengembangan SDM tersebut?

Human Development Report untuk tahun 2005 menunjukkan bahwa Indonesia untuk tahun 2003 tergolong pada *medium human development* yaitu pada posisi 110 dari 177 negara. Dengan nilai index sebesar 0.697, posisi Indonesia relatif tidak jauh dari rata-rata HDI untuk negara berkembang yang tercatat sebesar 0.694, tetapi masih lebih rendah dari rata-rata dunia yang tercatat sebesar 0.741. Dilihat dari angka melek huruf dan persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah, Indonesia juga masih tergolong rendah yaitu sebesar 87.9% dan 66%. Khusus indeks pendidikan, Indonesia mempunyai nilai sebesar 0.81,

masih lebih tinggi dari rata-rata negara berkembang dan dunia yang tercatat sebesar 0.72 dan 0.77. Statistik tersebut menjadi justifikasi terhadap urgensinya kebijakan pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi.

Dengan pendidikan, kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ilmu ekonomi, kita sudah mengenal istilah *knowledge based economy*. Menurut Dana dkk (2005), pengetahuan itu sendiri adalah integrasi dari informasi, gagasan, pengalaman, intuisi, ketrampilan, dan pelajaran berharga yang menciptakan nilai tambah untuk perusahaan. Sedangkan menurut OECD (1996), *knowledge based economy* adalah kegiatan ekonomi yang secara langsung berbasis pada produksi, distribusi, dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Jadi dengan program penguasaan pengetahuan dan informasi maka Indonesia mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana posisi Indonesia dalam hal pemanfaatan *knowledge based economy* tersebut?

Bank Dunia telah mengembangkan *Knowledge Economy Index* (KEI) untuk mengukur apakah lingkungan di suatu negara adalah kondusif terhadap pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi. Indeks tersebut dihitung berdasarkan tiga kelompok variabel yaitu insentif ekonomi dan rejim institusional, pendidikan dan sumber daya manusia, dan sistem inovasi. Indeks tersebut berkisar dari 0 (rendah) sampai 10 (tertinggi). Pada tahun 2005 Indonesia berada pada urutan ke-93 dari 132 negara dengan nilai indeks sebesar 2,96. Posisi tersebut lebih rendah dari rata-rata dunia yang tercatat sebesar 5.59. Bandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang berada pada posisi 20, 46, dan 65 dengan nilai indeks masing-masing sebesar 8.20, 5.69, dan 4.88. Gambaran perbandingan KEI Indonesia dengan negara lain serta nilai KEI Indonesia untuk setiap kelompok variabelnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber <http://info.worldbank.org/etools/kam/> (diolah)

Berdasarkan posisi dan indikator pengukuran KEI maka Indonesia perlu mengatasi permasalahan untuk ketiga variabel. Pertama adalah masalah di bidang insentif dan rejim institusional yang meliputi hambatan tarif dan non-tarif, kualitas regulasi, serta peraturan dan perundang-undangan. Masalah kedua di bidang pendidikan dan sumber daya manusia yang mencakup angka melek huruf serta tingkat pendidikan menengah dan atas. Dan terakhir masalah di bidang sistem inovasi mencakup jumlah peneliti yang bekerja di bidang penelitian dan pengembangan, paten yang dihasilkan, dan jumlah artikel di jurnal teknis atau ilmiah. Memang permasalahan tersebut erat kaitannya dengan isu strategis sebelumnya yaitu masalah pendidikan dan modal sumber daya manusia.

2.4. Perkembangan Teknologi dan Masalah Lingkungan

Can economic globalization succeed without destroying the environment and stretching the gap between rich and poor to new levels?

Globalization Odysseys

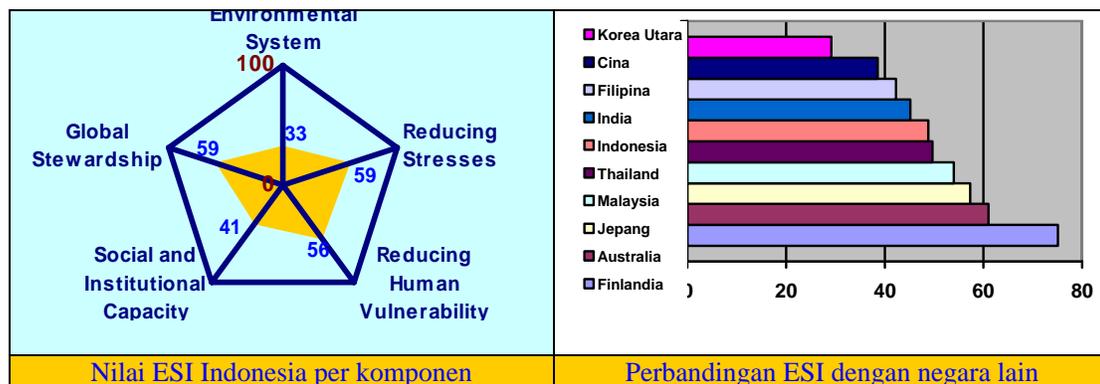
Salah satu isu utama mengenai perkembangan teknologi- sebagai sebagai faktor pendorong utama globalisasi, adalah eksploitasi sumber daya alam yang semakin mendorong kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan. Empat jenis teknologi yang menjadi pendorong perubahan di era globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi, teknologi bahan, genetika, dan teknologi energi. Tetapi pemanfaatan keempat teknologi tersebut berhadapan dengan aspek lingkungan. Dan aspek lingkungan tersebut harus menjadi orientasi dalam pemanfaatan keempat teknologi agar globalisasi tidak menimbulkan bencana lingkungan di masa depan.

Kondisi faktual Indonesia sendiri menunjukkan bahwa berbagai bencana lingkungan harus menjadi prioritas utama untuk dicarikan alternatif solusinya. Kebakaran hutan, sampah perkotaan yang *menggunung*, kelangkaan penyediaan air bersih, dan bencana lingkungan lainnya adalah sedikit contoh masih belum efektifnya kebijakan atau program pemerintah terhadap masalah lingkungan. Padahal di masa lalu, kita bangga mempunyai sekian juta hektar hutan tropis yang dianggap sebagai *paru-paru* dunia. Tetapi seiring dengan globalisasi ternyata laju konversi lahan produktif dalam bentuk hutan dan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman ternyata semakin tinggi. *Earth Policy Institute* melaporkan bahwa luas hutan di dunia pada tahun 2005 sebesar 3592 juta hektar atau berkurang sebesar 8,4% dibandingkan tahun 1990 yang tercatat sebesar 4077 juta hektar. Menurut angka yang dilaporkan *Forest Watch Indonesia* bekerja sama dengan *World Resources Institute* dan *Global Forest Watch*, angka penurunan luas hutan di Indonesia terus meningkat yaitu tercatat sekitar 2 juta hektar per tahun mulai tahun 1996. Konversi atas nama industrialisasi tersebut

mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya berbagai bencana lingkungan tersebut, atau setidaknya-tidaknya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

Memang kandungan lokal dan kekayaan sumber daya merupakan salah satu modal kita dalam bersaing di lingkungan global. Tetapi tanpa dibarengi usaha perlindungan dan konversi yang tepat, eksploitasi sumber daya alam tersebut bisa menjadikan Indonesia semakin terpuruk di masa yang akan datang. Janganlah karena usaha mengejar pertumbuhan perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang *membabi-buta* akhirnya kita mengalami mimpi buruk di tahun 2025 nanti. Dan kondisi saat ini ternyata menunjukkan bahwa Indonesia tergolong pada negara yang masih menghadapi masalah lingkungan yang ditunjukkan dengan *Environmental Sustainability Index* (ESI) yang dikembangkan oleh Yale University dan Columbia University bekerja sama dengan World Economic Forum.

ESI dihitung berdasarkan 76 variabel yang dikelompokkan ke dalam lima komponen utama yaitu sistem lingkungan, penurunan tekanan lingkungan, pengurangan kelemahan Sumber Daya Manusia, kapasitas sosial dan kelembagaan, serta kerja sama global untuk masalah lingkungan. Nilai ESI Indonesia adalah 48,8 dan berada pada urutan ke-75 dari 146 negara. Lagi-lagi posisi tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia, dan Thailand yang berada pada urutan 38 dan 73, tetapi lebih tinggi dibandingkan Filipina dan Vietnam yang berada pada posisi 126 dan 127. Nilai ESI Indonesia selengkapnya untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: <http://www.yale.edu/esi/> (diolah)

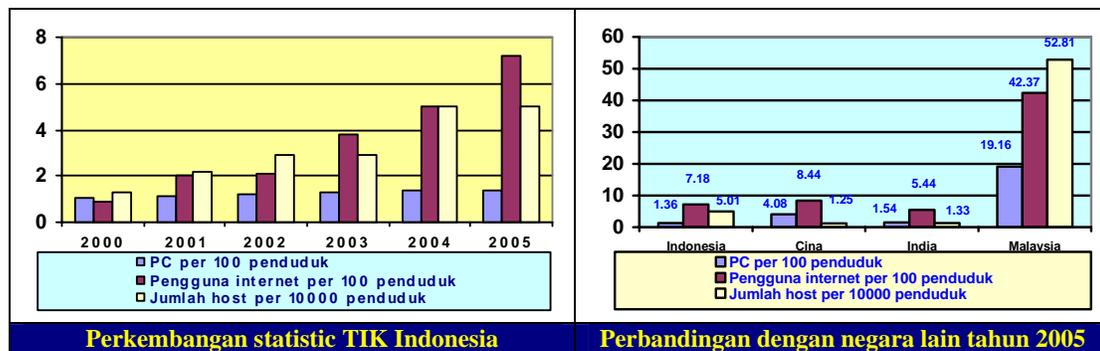
2.5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

OECD mendefinisikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut TIK, sebagai rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan elektronik yang mencakup pengolahan, transmisi, dan penyajian informasi. TIK merupakan konvergensi dari tiga wilayah yaitu teknologi informasi, data dan informasi, serta masalah-masalah

sosioekonominya. Kondisi teknologi informasi di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Ketertinggalan teknologi tersebut dapat dilihat dari ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, jumlah komputer yang dimiliki perusahaan, atau akses internet.

World Bank (2002) melaporkan profil pemanfaatan *information and communication technology* (ICT) di Indonesia, yaitu rasio jumlah komputer 9.9 per 1000 penduduk, sambungan telpon 91 per 1000 penduduk, jumlah *internet host* 0.8 per 10 000 penduduk dengan pengguna internet sebanyak 2 juta orang. Investasi dibidang ICT tercatat sebesar US\$ 3,54 Milyar atau 2.2 persen terhadap PDB dengan investasi ICT per kapita sebesar US\$ 16.6. Bagaimana kondisi dan posisi Indonesia dalam penerapan TIK dibandingkan dengan negara-negara di Asia dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Lembaga lain, yaitu *The Economist Intelegent Unit* mengeluarkan *E-readiness ranking* untuk tahun 2006. Indonesia memperoleh nilai keseluruhan sebesar 3.39 atau menempati ranking ke-62 dari 68 negara yang disurvei. Ranking Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan Singapura yang menempati urutan ke-13, Malaysia ke-37, Thailand ke-47, Filipina ke-56; dan hanya 4 tingkat lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang menempati urutan ke- 66.



Sumber: *International Telecommunication Union* (diolah)

World Economic Forum menggunakan *Networked Readiness Index* (NRI) untuk mengukur tingkat kesiapan setiap negara atau komunitas dalam berpartisipasi atau memperoleh manfaat dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Indeks tersebut dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu (1) lingkungan untuk TIK yang ditawarkan setiap negara atau komunitas, (2) Kesiapan individu, perusahaan, dan pemerintah, serta (3) penggunaan TIK oleh setiap pelaku tersebut. Nilai NRI Indonesia pada tahun 2005 adalah -0.36 dan menempati urutan ke-68 dari 115 negara yang disurvei. Posisi tersebut tertinggal jauh dari Singapura yang berada pada posisi 2, Malaysia urutan 24, dan Thailand urutan 34, tetapi lebih tinggi dibandingkan Filipina dan Vietnam yang berada pada urutan 70 dan 75.

2.6. Kemampuan Bersaing di Era Globalisasi

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan besar di era informasi dan globalisasi saat ini jika dilihat dari berbagai indikator. Muara akhir dari berbagai indikator sebelumnya adalah tingkat daya saing nasional kita tergolong masih rendah. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* pada tahun 2006 posisi daya saing Indonesia berada pada urutan 50 diantara 125 negara. Posisi Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, yang berturut-turut berada pada posisi ke-5, 26, dan 35 tetapi lebih tinggi dibandingkan Filipina dan Vietnam yang berada pada urutan 71 dan 77.

DUNIA DAN INDONESIA DI TAHUN 2025

3.1 Skenario Global

The goal of generating scenarios is to understand the mix of strategic decisions that are of maximum benefit in the face of various uncertainties and challenges posed by the external environment

Jerome C. Glenn (2006).

Seperti apa dunia di masa datang menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan oleh para ahli atau berbagai pihak. Beberapa skenario yang mungkin terjadi di tahun 2025 telah banyak dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional, satu diantaranya adalah “The Shell Global scenarios to 2025”, seperti diringkaskan pada tabel berikut.

<i>Low Trust Globalization: A Legalistic Prove it to me World</i>
Dunia diatur oleh tindakan hukum, fakta perjanjian, regulasi, dan pengacara internasional. Pertumbuhan ekonomi yang moderat menyebabkan kehati-hatian para investor. “Tidak adanya solusi pasar terhadap krisis kepercayaan dan keamanan, perubahan regulasi yang cepat, yurisdiksi yang tumpang tindih serta konflik hukum yang mendorong pengawasan dan pemeriksaan berlebihan, - mendorong optimisasi portofolio jangka pendek serta ketidaksinambungan vertikal yang membatasi integrasi ekonomi lintas batas. Ketaatan terhadap berbagai peraturan yang berkembang pesat dan pengelolaan resiko rumit merupakan tantangan utama.
<i>Open Doors: A Pragmatic, “Know Me” World</i>
Dunia perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan investasi teknologi. Jaminan ketataan dan keamanan yang terintegrasi, keselarasan regulasi, saling menghargai, media yang independen, aturan pelaksanaan yang bersifat sukarela serta hubungan dekat antara para investor dengan masyarakat sipil, - mendorong integrasi lintas batas dan rantai nilai <i>virtual</i> . Hal yang sangat penting adalah ketrampilan dalam membuat jaringan (<i>networking</i>) dan manajemen reputasi yang unggul.
<i>Flags: A Dogmatic, “Follow Me” World</i>
Dunia dimana pemerintahan nasional hanya memperhatikan kepentingannya masing-masing, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan investasi internasional. Prinsip “Zero-sum games”, pendekatan yang memaksa (<i>dogmatis</i>), fragmentasi regulasi, dan kepentingan nasional, - menimbulkan benturan nilai dan kepercayaan yang memberikan keuntungan kepada para <i>insider</i> dan melambatnya globalisasi. Masyarakat yang tertutup, perlindungan, dan standar nasional menyebabkan fragmentasi yang lebih buruk dan memerlukan pengelolaan resiko negara yang hati-hati.

Sumber: <http://www.shell.com/scenarios/>

Skenario tersebut merupakan salah satu gambaran umum yang mungkin dihadapi oleh kita semua di tahun 2025. Skenario pertama menunjukkan bahwa pada tahun 2025 masyarakat

dunia menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap arus globalisasi. Dengan kata lain, kita pesimis terhadap globalisasi. Hidup dan kehidupan pun perlu diatur oleh berbagai peraturan, hukum, atau fakta perjanjian yang mengikat negara-negara di dunia. Skenario tersebut kelihatannya merupakan akhir yang kurang baik dari berbagai peraturan dan perjanjian yang mengikat negara-negara dalam era globalisasi saat ini, seperti WTO, AFTA, OPEC, dan berbagai resolusi PBB yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Yang tidak patuh akhirnya harus dikucilkan bahkan dihukum dengan dalih melanggar “perjanjian” atau “peraturan” bersama. Jaringan LSM internasional atau pihak lain yang anti globalisasi mungkin dilandasi kekhawatiran tersebut.

Skenario kedua merupakan skenario yang ”indah”. Dunia yang harmonis, saling percaya, dan hidup berdampingan. Skenario ini relatif berbanding terbalik dengan kondisi dunia saat ini yang masih diwarnai kecurigaan, konflik regional, dan isu terorisme. Kondisi dunia pada saat ini malah mendekati skenario ketiga dimana setiap negara hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dunia yang diwarnai ”siapa kuat dialah yang menang”. Bahkan yang sangat dikhawatirkan adalah benturan peradaban seperti telah dikemukakan oleh Samuel Huntington. Tanda-tanda kearah sana bisa dilihat dari konflik sektarian, konflik regional, isu terorisme, dan berbagai benturan kepentingan lainnya yang muncul akhir-akhir ini.

Gambaran dunia di tahun 2025 juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu dan teknologi saat ini dan proyeksi perkembangannya di masa depan. Banyak para ahli menganggap era globalisasi sebagai *era of the brain*. Tapi pertanyaannya apakah perkembangan IPTEK akan membuat dunia menjadi semakin lebih baik? Mari kita lihat skenario lainnya yang lebih menitikberatkan pada kemajuan IPTEK dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dunia di tahun 2025, seperti disajikan pada tabel berikut.

Skenario <i>S&T Develops a Mind of its Own</i>
Laju penemuan ilmiah dan penerapan teknologi maju sangat tinggi. Sistem umpan balik sosial dan pengetahuan global pun sudah bekerja dengan baik: pengetahuan membuat orang lebih pintar dan orang pintar membuat pengetahuan lebih baik dan maju. Pengetahuan yang lebih maju akan membuka penemuan-penemuan baru. Penemuan baru tersebut mengarah ke sinergis dan bisa mengatasi berbagai hambatan yang masih dihadapi saat ini. Dan akhirnya penghilangan berbagai hambatan tersebut mendorong penciptaan temuan yang lebih baru yang membuat masyarakat semakin pintar. Jadi pengetahuan dan teknologi bergerak sangat cepat sehingga pemerintah dan regulasi internasional pun tertinggal. Jadi pengetahuan dan teknologi bergerak dengan sendirinya.
Skenario <i>The World Wakes Up</i>
Lembaga dan berbagai mekanisme regulasi mengawasi pengetahuan dan teknologi yang dianggap membahayakan. Pendidikan merupakan bagian utama dari jawaban tetapi mengkaitkan sistem pendidikan dengan sistem keamanan akan mengganggu sebagian masyarakat. Namun demikian, tindakan individu yang merusak perlu dicegah. Regulasi pemerintah dan dunia internasional akan mengatur perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengetahuan dan teknologi untuk barang-barang publik.
Skenario <i>Please Turn off the Spigot</i>
Pengetahuan dituduh sebagai arogan dan mementingkan diri sendiri, mendorong kelebihan konsumsi,

menimbulkan harapan kosong, dan – lebih buruk lagi- pengetahuan menimbulkan akibat yang tak-terduga yang bisa menghancurkan kita semua. Kekhawatiran muncul dengan penemuan organisme yang mengalami modifikasi genetik yang berpotensi sebagai senjata pemusnah massal. Masyarakat miskin pun terabaikan. Guru pengetahuan pun muncul untuk menyadarkan masyarakat. Institusi global sudah didirikan tetapi gagal karena korupsi. Tetapi lembaga baru dengan upaya pengawasan yang melekat kelihatannya akan bekerja dengan baik.

Skenario *Backlash*

Pengawasan lemah dan pengetahuan bergerak dengan cepat, tetapi konsekuensinya menyebabkan ketakutan publik. Era emas pengetahuan terlalu digembar-gemborkan oleh media, tetapi semuanya terbukti hanya mimpi atau khayalan saja. Sebagian penemuan yang sangat bernilai dan kemampuan baru menimbulkan persoalan dan sungguh mengejutkan. Bangsa-bangsa yang “jahat” mengambil keuntungan dari berbagai masalah tersebut. Tingkat perhatian meningkat dan masyarakat pun protes. Regulasi telah gagal dan kemajuan pun melambat. Selain itu, para peneliti di perusahaan (atau pemerintahan) sering merasakan tekanan dari dalam organisasinya sendiri. Baik perusahaan maupun pemerintahan tidak dapat diharapkan untuk mengatur sendiri di bidang pengetahuan dan teknologi.

Sumber: Glenn and Gordon (2006)

Skenario pertama menggambarkan bagaimana pesatnya perkembangan IPTEK di tahun 2025, bahkan perkembangan tersebut tidak bisa diimbangi oleh peraturan nasional bahkan internasional. Apakah IPTEK tersebut bisa memberikan hidup dan kehidupan yang lebih baik bukan menjadi perhatian lagi karena IPTEK berkembang atas kepentingannya sendiri. IPTEK adalah segala-galanya. Sebuah dunia yang aneh memang. Tetapi apakah masyarakat yang semakin pintar dapat menjamin masyarakat dunia di tahun 2025 terbebas dari segala persoalan yang masih dihadapi saat ini?

Skenario kedua lebih mendekati kondisi IPTEK saat ini, terutama mengenai pengaturan dan kesepakatan internasional terhadap produk IPTEK yang dianggap membahayakan. Teknologi kloning yang masih menjadi perdebatan dan isu nuklir yang menjadi polemik internasional merupakan salah satu contoh bagaimana masyarakat dunia perlu membuat pembatasan-pembatasan terhadap perkembangan kedua jenis teknologi tersebut. Skenario ketiga merupakan bentuk yang lebih ekstrem lagi. IPTEK dianggap sebagai penyebab kehancuran dunia. Harapan terhadap IPTEK pun mencapai pada titik terendah. Dan kemajuan IPTEK seperti digambarkan pada skenario pertama mungkin tidak akan terjadi karena masyarakat menilai sudah saatnya perkembangan IPTEK dihentikan.

Skenario keempat menggambarkan bagaimana perkembangan IPTEK yang pesat ternyata dibarengi dengan kegagalan dalam aspek pengawasan. Skenario ini memungkinkan negara yang unggul dibidang IPTEK bisa mengeksploitasi negara yang terbelakang. Kelihatannya skenario ini mulai terlihat tanda-tandanya pada perkembangan IPTEK saat ini. Negara maju bisa mendikte negara berkembang yang akhirnya menjadi tergantung sama teknologi negara maju. Negara maju begitu dapat menikmati keuntungan yang tinggi dari penggunaan temuan mereka yang digunakan di negara terbelakang tanpa mempedulikan dampak sosioekonomi dan lingkungan dari teknologi tersebut.

Berbagai ramalan tersebut secara umum minimal terdiri dari dua kutub yaitu dunia yang lebih baik (optimis) atau sebaliknya dunia yang menyeramkan (pesimis), dan diantara dua kutub tersebut biasanya ada beberapa skenario moderat. Beberapa perkembangan atau perbaikan global – yang tentunya berkonotasi baik, adalah penurunan konflik militer, peningkatan kalori per kapita, peningkatan harapan hidup, peningkatan melek huruf, penurunan kematian bayi, peningkatan akses terhadap air bersih, peningkatan perawatan kesehatan, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan pendidikan, serta peningkatan akses internet.

Sedangkan beberapa kecenderungan global yang menimbulkan masalah diantaranya adalah peningkatan emisi CO₂, penurunan lahan pertanian yang produktif, peningkatan pengangguran, penurunan luas hutan, penurunan produksi padi per kapita, peningkatan kesenjangan kaya-miskin, peningkatan kematian akibat AIDS, peningkatan hutang negara-negara berkembang, serta peningkatan kejahatan terorganisir. Dan rasanya tidak salah bila beberapa lembaga dan pemerhati globalisasi justru cenderung melihat dampak negatif globalisasi terhadap masa depan dunia.

3.2. Belajar dari Skenario Negara Lain

Setiap negara di dunia tentunya mempunyai keinginan yang sama mengenai bagaimana masing-masing negara dapat menyiapkan diri dan menjadi bangsa yang berhasil di tahun 2025. Tetapi sekali lagi, masa depan adalah ketidakpastian yang tidak bisa diprediksi secara tepat. Walaupun demikian, setiap negara berusaha untuk memprediksi berbagai skenario yang mungkin dihadapi oleh setiap negara dan berusaha untuk mengantisipasinya mulai dari sekarang. Menurut Glenn (2006) skenario (global) dibuat dan dimanfaatkan untuk (a) menemukan apa yang belum diketahui sebelum mengambil keputusan, (b) memahami ketidakpastian, (c) menggambarkan apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi, (d) mengidentifikasi strategi yang tepat pada setiap skenario yang mungkin terjadi, (e) membuat masa depan lebih nyata bagi para pengambil keputusan untuk mendorong pemikiran dan keputusan baru, serta (f) mempelajari apa yang harus dihindari dan memanfaatkan peluang-peluang baru.

Sebagai bahan perbandingan, mari kita lihat bagaimana Cina dan India mempunyai skenario mengenai masa depan kedua negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia tersebut. Cina mempunyai skenario *Regional Ties*, *Unfulfilled Promise*, dan *New Silk Road*, sedangkan India mempunyai skenario *Bolly World*, *Pahale India*, dan *Atakta Bharat*. Gambaran skenario kedua negara tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

Skenario 2025	
Cina	<p><i>Regional Ties</i> Skenario yang menggambarkan bagaimana Cina melanjutkan arah reformasi meskipun lingkungan internasional menjadi semakin sulit. Visi dan kepemimpinan Cina memfasilitasi pembentukan kerja sama regional untuk mengatasi permusuhan dan perbaikan kesejahteraan di wilayah Asia.</p>
	<p><i>Unfulfilled Promise</i> Skenario yang menggambarkan Cina di mana keinginan untuk pengembangan ekonomi tidak didukung dengan reformasi struktural yang memadai. Skenario ini mencerminkan sentimen umum di antara rakyat Cina yang menunjukkan bahwa janji pengembangan ekonomi yang luas ternyata sebagian besar tidak bisa diwujudkan.</p>
	<p><i>New Silk Road</i> Skenario yang menggambarkan peningkatan budaya dan ekonomi cina yang sukses, suatu pencapaian yang dihasilkan tanpa adanya hambatan internal yang substansial. Skenario ini mencerminkan integrasi geopolitik Cina yang damai dan peranan besarnya dalam pertukaran barang, jasa, investasi, dan ide-ide. Melalui jalan tersebut tercipta jalan sutra yang sesungguhnya.</p>
India	<p><i>Bolly World</i> Nama skenario ini diberikan untuk menunjukkan industri film India yang sangat sukses yang terkenal dengan film-film <i>masala</i> – sebuah pertunjukkan melodrama dengan sejumlah tarian dan nyanyian yang spektakuler. Judul tersebut mencerminkan masa depan India dimana para pemimpin India dibuat bingung oleh keuntungan mendadak dari pasar internasional yang gagal mereka implementasikan untuk kepentingan reformasi domestik.</p>
	<p><i>Pahale India</i> Artinya India yang utama dan ini dicerminkan dalam bentuk skenario minimal melalui tiga cara yaitu (1) Orang-orang India menempatkan kebutuhan masyarakat dan negaranya sebagai hal yang utama. (2) India muncul sebagai pemimpin ekonomi global, dan (3) pengembangan internal India yang dinamis menjadikan hal tersebut sebagai sumber informasi atau inspirasi bagi negara-negara lain.</p>
	<p><i>Atakta Bharat</i> Skenario ini menggambarkan India mengalami kemandegan tanpa arah. Hal tersebut tercermin dari kurangnya tindakan bersama dan tiadanya kepemimpinan yang efektif yang menimbulkan keberlanjutan dan akumulasi dari permasalahan di India saat ini.</p>

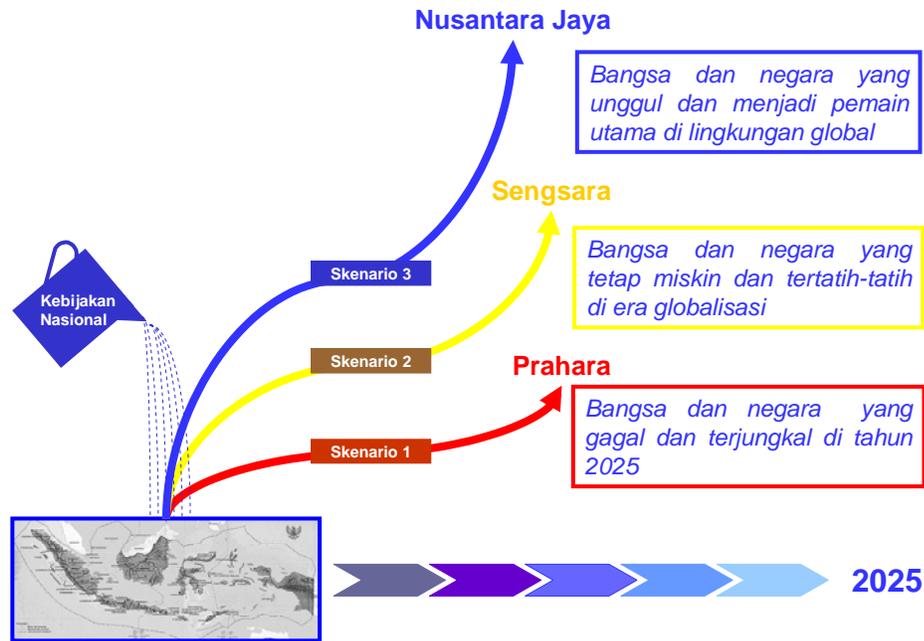
Belajar dari skenario kedua Negara tersebut, kita bisa melihat bagaimana Cina dan India mempunyai keberanian untuk tampil sebagai pemimpin regional dan global di tahun 2025. Hal tersebut bisa dilihat dari skenario *new silk road* untuk Cina dan *Pahale India* untuk India. Keberanian tersebut tentunya diimbangi dengan berbagai program-program strategis yang mulai dirancang oleh kedua Negara tersebut mulai dari sekarang. Walaupun demikian, kedua Negara tersebut tetap menggambarkan skenario buruk yaitu *Atakta Bharat* dan *Unfulfilled promise*. Dalam konteks positif, gambaran buruk tersebut merupakan salah satu bentuk konsekuensi yang harus ditanggung jika berbagai program-program strategis tersebut gagal diimplementasikan atau bahkan lebih parah lagi, tidak berbuat apa-apa dalam menghadapi tahun 2025. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana gambaran Indonesia di tahun 2025 ? Dan bagaimana Indonesia harus bersiap-siap sejak dini untuk mengantisipasi berbagai skenario di tahun 2025?

3.3. Meramal Indonesia di Tahun 2025

Jika melihat posisi Indonesia di lingkungan global saat ini, maka pertanyaan menarik adalah apakah posisi indonesia lebih baik dari sekarang, sama saja, atau bahkan lebih buruk?

Peran BI Menuju Indonesia 2025: Prahara, Sengsara, atau Nusantara Jaya?

Penulis mencoba membuat gambaran untuk ketiga kemungkinan tersebut yang didasarkan pada posisi Indonesia dalam lingkungan global saat ini serta berbagai skenario global di tahun 2025, termasuk belajar dari skenario yang telah dikembangkan oleh Cina dan India. Tiga skenario Indonesia di tahun 2025 yang mungkin terjadi adalah prahara, sengsara, dan nusantara jaya. Gambaran umum ketiga skenario tersebut untuk masing-masing aspek kehidupan dan pemerintahan disajikan dalam bentuk gambar dan tabel berikut.



Skenario pertama merupakan skenario terburuk yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap negara, yang pada prinsipnya selalu berusaha untuk mencapai skenario yang ketiga. Skenario kedua merupakan skenario yang moderat yang menggambarkan Indonesia tidak lebih baik kondisi saat ini, seperti telah digambarkan pada bab 2. Gambaran selengkapnya untuk ketiga skenario tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

	Prahara	Sengsara	Nusantara Jaya
ASPEK PENTING	Indonesia adalah bangsa dan negara yang gagal dan terpinggirkan di tahun 2025, yang dibayangi dengan desintegrasi bangsa dan permasalahan berat di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, politik, dan teknologi.	Indonesia adalah bangsa dan negara yang sekedar mengikuti arus globalisasi tetapi bukan sebagai pemain dalam percaturan global. Tingkat kesejahteraan juga tidak lebih baik dari kondisi saat ini.	Indonesia adalah bangsa dan negara yang unggul dan menjadi pemain utama di lingkungan global dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa.
Kepemimpinan nasional dan pemerintahan	Terjadi krisis kepemimpinan nasional dan dibayangi desintegrasi bangsa. Angka korupsi pun semakin tinggi dan tidak	Kepemimpinan nasional yang lemah dan masih menghadapi masalah transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab Public, serta masalah korupsi yang	<i>Good corporate governance</i> berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat dan berwibawa

Peran BI Menuju Indonesia 2025: Prahara, Sengsara, atau Nusantara Jaya?

	bisa dikendalikan	belum teratasi	
Kinerja ekonomi	Krisis ekonomi terjadi lagi yang diwarnai dengan pendapatan per kapita yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi	Perkembangan ekonomi berada pada kelompok negara berkembang yang masih dibayangi masalah distribusi dan ketidakadilan ekonomi	Menjadi negara yang tergolong negara maju dalam perekonomian global dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi
Pengembangan Social	Kemiskinan dan standar hidup yang rendah mendorong krisis sosial yang rentan terhadap benturan antar kelompok kepentingan	Ada perbaikan keseimbangan sosial yang berlandaskan pada peluang berusaha yang sama dan partisipasi wanita dan penduduk miskin. Tetapi keseimbangan tersebut belum bisa meningkatkan taraf hidup	Masyarakat sipil yang kuat dan menjadi pelaku utama dengan struktur sosial yang berlandaskan pada semangat bhineka tunggal ika
Hubungan eksternal	Tidak terlibat aktif dalam kerjasama internasional, bahkan menjadi perhatian dan bantuan dunia internasional karena berbagai krisis multidimensi yang terjadi	Hanya sebagai obyek dan penonton globalisasi sehingga tidak bisa menjadi mitra internasional yang disegani	Menjadi mitra kerja sama yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendorong hubungan dan kerja sama internasional
Kesehatan dan Lingkungan hidup	Kelaparan dan kurang gizi mendorong kualitas hidup dan kualitas lingkungan yang sangat rendah, yang ditandai epidemi penyakit dan bencana lingkungan sebagai bencana skala nasional	Usaha perbaikan standar kesehatan dan kualitas lingkungan hanya menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang yang masih perlu memperkuat kebijakan dan program perbaikan untuk kedua aspek tersebut	Angka harapan hidup meningkat yaitu sekitar 65 tahun, dengan daya dukung lingkungan yang lestari dan program pemanfaatan yang berkelanjutan
IPTEK	Kemampuan SDM yang rendah menyebabkan kemunduran di bidang IPTEK	Negara yang tergolong sebagai pengguna IPTEK	Tergolong sebagai negara pencipta IPTEK dan mulai mengarah ke <i>knowledge based economy</i>
Jati diri dan identitas nasional	Identitas dan jati diri bangsa telah luntur di tengah pergaulan dunia, yang diwarnai dengan benturan kebudayaan dan kepentingan lokal yang mengarah pada perpecahan dan desintegrasi bangsa	Jati diri dan identitas nasional belum muncul sebagai citra positif di mata dunia internasional, tetapi hanya sebatas kumpulan kearifan dan kebudayaan lokal yang sewaktu-waktu bisa menjadi sumber benturan atau pergolakan	Dikenal sebagai bangsa yang mempunyai jatidiri dan identitas yang menjadi citra positif di tengah pergaulan internasional. Jati diri tersebut mengakar pada kebesaran kebudayaan nasional

Apapun gambaran masa depan tersebut, setiap bangsa dan negara berupaya dan berkeinginan untuk tetap berdiri, bertahan, bahkan unggul di masa depan. Indonesia sendiri tentunya sangat menginginkan skenario “Nusantara Jaya”. Jika masa depan adalah milik generasi mendatang maka upaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari generasi sekarang. Bahasa *klisenya*, masa depan adalah titipan atau warisan anak cucu kita. Apakah titipan dan warisan generasi Indonesia mendatang akan kita jaga, bahkan diinvestasikan atau terus *dipupuk* dengan baik mulai saat ini agar warisan tersebut semakin bertambah pada saat dinikmati oleh generasi mendatang? Atau

justru sebaliknya, warisan tersebut mulai digerogeti sehingga anak cucu kita menjadi bangsa yang miskin dan terpinggirkan di lingkungan global? Jika kita sepakat mengambil pilihan pertama maka begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan mulai hari ini. Dan itu dimulai dengan menyamakan visi atau cita-cita, kalau tidak bisa disebut mimpi tentang dunia yang lebih baik di tahun 2025 untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini.

3.4. Ekacita Pancabakti 2025

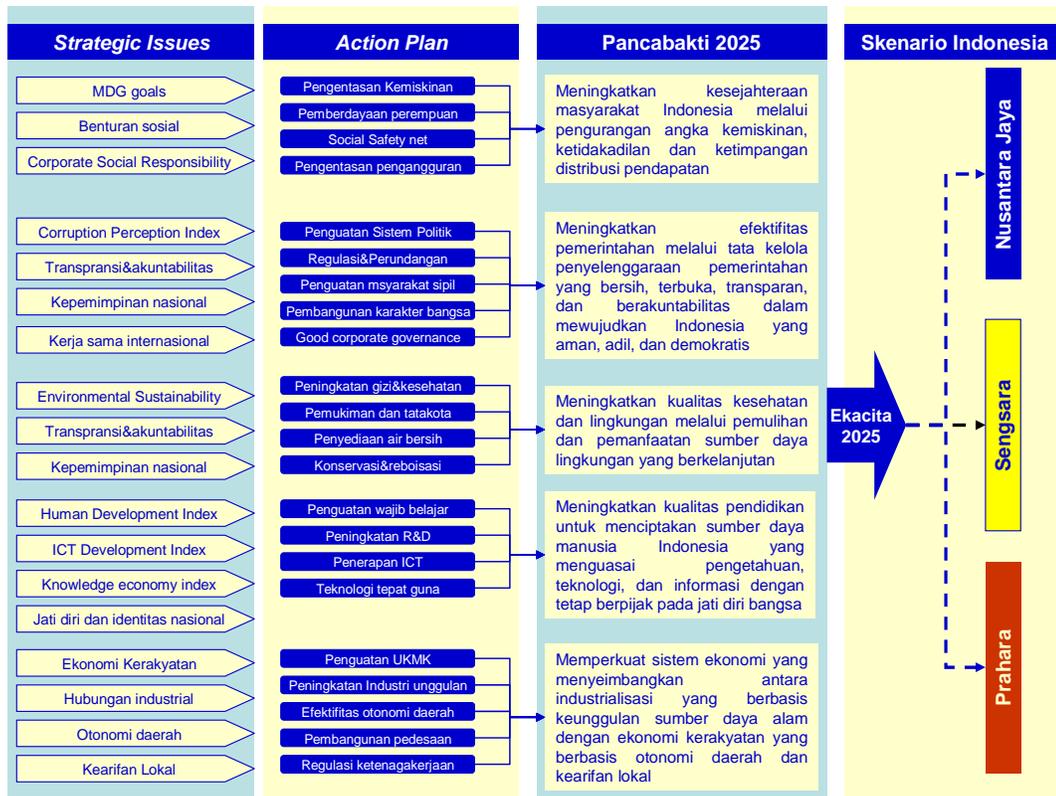
Identitas nasional digantikan oleh identitas kontinental. Mulai tahun 2025, aspek kebudayaan lokal atau nasional mulai menghilang, dan hanya sekedar sebagai obyek pariwisata dan komoditi perdagangan
Globalization Odysseys

Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus mempunyai keinginan atau cita-cita bersama yang bisa dijadikan sumber motivasi dalam menghadapi globalisasi, khususnya dalam menyongsong tahun 2025. Keinginan tersebut adalah harapan atau mimpi tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mimpi yang akan diusahakan bersama untuk menjadi kenyataan itulah yang disebut Visi, atau dengan menggunakan bahasa lokal kita adalah satu cita-cita bersama atau *ekacita* menuju tahun 2025.

Visi Indonesia 2025		
1.	Indonesia	Menjadi bangsa yang unggul dengan tetpa mempertahankan jati diri dan identitas nasional di lingkungan global pada tahun 2025
2.	Pemerintah	Menempatkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai standar hidup dan daya saing tergolong negara maju pada tahun 2025

Bagaimana kita bisa meraih cita-cita bersama tersebut diwujudkan dalam lima program strategis yang penulis sebut sebagai **pancabakti** untuk mewujudkan cita-cita bersama di tahun 2025. Kerangka rencana strategis Indonesia 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pengembangan kerangka kerja tersebut secara umum terdiri 5 dimensi yaitu (a) *strategic issues* yang dibahas di bab 2, (b) rencana strategis atau panca bakti 2025, (c) visi Indonesia 2025 atau ekacita 2025, (d) *action plan* untuk setiap rencana strategis dan (e) skenario Indonesia 2025. Keberhasilan dalam menangani *strategic issues* - yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih relatif lemah posisinya di lingkungan global – sangat menentukan skenario mana yang akan terjadi di tahun 2025. Indikasi skenario yang terjadi tersebut menggunakan beberapa indikator kinerja – dalam hal ini mengacu kepada sejumlah indikator global khususnya *MDG goals*- yang akan dijelaskan pada masing-masing *action plan* pada selanjutnya.

Peran BI Menuju Indonesia 2025: Prahara, Sengsara, atau Nusantara Jaya?



Sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat, globalisasi bukan berarti harus menghilangkan identitas dan jati diri Indonesia di tengah persaingan global. Para pendiri negara dan leluhur bangsa telah memberikan beberapa warisan nilai dan budaya yang patut dipertahankan dan tetap selaras pada saat ini dan di masa yang akan datang. Kebhinekaan Indonesia dengan segala keragaman adat dan budaya merupakan salah satu ciri utama bangsa yang harus dijaga keharmonisan dan integrasinya sehingga menjadi kekuatan utama dalam bersaing di era globalisasi.

Globalisasi bukan berarti menghilangkan keberagaman. Globalisasi juga bukan berarti memaksakan atau mendiktekan nilai-nilai atau keinginan tertentu yang dianut suatu negara untuk digunakan oleh negara-negara lainnya. Jati diri dan harga diri bangsa bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan hanya untuk diakui dalam pergaulan internasional. Justru kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan antar negara harus menjadi landasan dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik. Sebuah semangat "bhineka tunggal ika" dalam mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Dan identitas dan jati diri bangsa Indonesia sendiri menurut pendapat penulis tidak bertentangan dengan arus globalisasi.

Kinerja pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia 2025 harus terukur, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi

keberhasilan pelaksanaan program atau kebijakan yang telah dilakukan. Dan ekacita 2025 pada prinsipnya merupakan kondisi atau keadaan ideal yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia saat ini, untuk semua aspek kehidupan. Apa ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi yang lebih baik tersebut merupakan indikator kinerja yang harus berusaha untuk bisa dicapai. Indikator kinerja beserta target pencapaian yang dicanangkan selama perjalanan 19 tahun ke depan bisa dilihat pada tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja	Target Pencapaian Kinerja		
		Baseline	2015	2025
1.	Angka Kemiskinan	17.5%	10%	5%
2.	Pendapatan per kapita	1500	3000	6000
3.	Predikat Pencapaian MDG goals	tertinggal	On track	Early achiever
4.	Human Development Index Ranking	110	50	25
5.	Global Competitiveness Index Ranking	50	30	15
6.	Networked Readiness index Ranking	68	30	10
7.	Knowledge Based Economy Index Ranking	93	75	30
8.	Corruption perception index ranking	130	75	30
9.	Environmental Sustainability Index ranking	75	50	25

PERAN BANK INDONESIA MEWUJUDKAN INDONESIA 2025

Indonesia 2025 yang lebih adil dan sejahtera serta berjaya di era globalisasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penulis akan lebih menitikberatkan pada posisi dan peran Bank Indonesia dalam mendukung program-program nasional dalam mewujudkan masa depan negara dan bangsa kita, yang skenario dan visinya sudah dijelaskan sebelumnya. Posisi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan merupakan posisi yang penting dan strategis dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1998, Bank Indonesia harus mempunyai perencanaan strategis berikut program implementasinya yang selaras dengan visi Indonesia 2025, tetapi tetap berpijak pada wilayah tugas dan kewenangannya sebagai bank sentral di Indonesia.

6.1. Kilas Balik Perbankan Indonesia

Masa lalu perbankan Indonesia bisa dijadikan cermin agar tidak salah melangkah ke masa depan. Seburuk apapun masa lalu, kita tetap bisa menarik pelajaran berharga. Dan sejarah perbankan Indonesia setelah serangkaian deregulasi menunjukkan betapa masa lalu telah memberikan pelajaran mengenai arti pentingnya sebuah integritas. Pelajaran yang mahal memang dan dengan *social cost* yang tinggi yang akhirnya harus ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun mulai deregulasi pada tahun 1983 sampai saat ini, perbankan Indonesia telah mengalami berbagai *gonjang-ganjing* yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Titik nadir perbankan sendiri terjadi menjelang krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1997 yang dikenal sebagai krisis moneter. Beberapa tonggak penting perjalanan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut.

1. Paket 1 Juni 1983 merupakan salah satu tonggak penting yang mengubah arah perbankan nasional yang tadinya belum mengikuti mekanisme pasar, atau dengan kata lain, mulai diterapkannya *equal treatment* antara bank pemerintah dengan bank swasta. Penganut paham kapitalisme jelas mendukung kebijakan ini dengan argumentasi bahwa mekanisme pasar akan mengarah ke efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dan perbankan diharapkan menjadi lokomotif untuk itu dengan memobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kita akan melihat pada perjalanan perbankan berikutnya apakah tujuan tersebut akan terwujud dengan lancar.
2. Kebijakan Oktober 1988 menjadi faktor utama terjadinya *booming* pendirian bank dengan memberikan kemudahan bagi para investor. Dalam kurun waktu 3 tahun sesudahnya, tercatat jumlah bank meningkat dari 111 bank pada tahun 1988 menjadi 182 bank pada pertengahan 1991. Pertumbuhan bank beserta kegiatan penyaluran dana bank yang luar biasa tersebut akhirnya berujung pada tindakan kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*) yang diambil oleh Bank Indonesia pada Tahun 1990. Kebijakan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi dan moneter yang terlalu cepat tersebut tidak diimbangi dengan oleh pertumbuhan sektor riil. Disini sinyal-sinyal negatif mengenai ancaman terhadap integritas dan kredibilitas bank mulai terdeteksi, dan sinyal tersebut bagai *api dalam sekam* atau bom waktu yang siap meledak di kemudian hari.
3. Pakfeb 1991, yang bertujuan untuk mengembangkan dunia perbankan menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan tangguh serta lebih dipercaya baik dalam tingkat nasional maupun global. Sistem penilaian kesehatan bank dengan CAMEL mulai diterapkan oleh Bank Indonesia, termasuk penetapan nilai CAR sebesar 8 persen yang harus dipenuhi mulai tahun 1993. Tetapi ternyata tujuan tersebut tidak tercapai, bahkan kepercayaan terhadap perbankan nasional rontok dan mencapai titik nadir mulai tahun 1997.
4. Bom waktu perbankan akhirnya meledak, dan tidak tanggung-tanggung dampak *letusannya* terhadap perekonomian Indonesia. Pada November 1997 sejumlah bank mulai rontok yang diawali dengan ditutupnya 16 bank yang akhirnya menyeret Indonesia ke krisis moneter yang *tak terlupakan* dalam sejarah perekonomian Indonesia.

5. Pada tahun 1998 dibentuk BPPN sebagai lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan wajah perbankan Indonesia. BPPN lahir sebagai salah satu butir dalam serangkaian *Letter of Intent* (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, dengan LOI pertamanya ditandatangani pada 1 November 1997. Pembentukan BPPN ini dianggap sebagai awal proses rehabilitasi terhadap industri perbankan. Pada tahun 1988, dari 55 bank yang *dirawat* oleh BPPN ternyata 10 bank tidak tertolong (dikuidasi), 4 bank harus masuk unit gawat darurat (direkapitalisasi), dan sisanya masih terus *dirawat intensif*. Pada maret 1999 38 bank kembali *tak tertolong*, 9 bank direkapitalisasi, dan 7 bank diambil alih. Program rehabilitasi ternyata memakan korban yang banyak dengan biaya rehabilitasi yang tidak sedikit yaitu sekitar 439 Triliun (Pangestu dan Habir, 2003), termasuk meminta bantuan asing yang *dikapteni* oleh IMF.

Saat ini Bank Indonesia sudah memasuki tahap konsolidasi yang ditandai dengan implementasi API tahun 2004. Perkembangan terakhir adalah dikeluarkannya Pakto 2006 berupa paket kebijakan baru untuk mendorong fungsi intermediasi bank dan konsolidasi perbankan. Menurut Burhanuddin Abdullah, dengan dikeluarkannya paket kebijakan ini, akan semakin membuka ruang gerak perbankan dalam menyalurkan kredit dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, serta mendorong tercapainya konsolidasi perbankan pada tahun 2010. Kebijakan relaksasi atas beberapa ketentuan untuk mengoptimalkan intermediasi perbankan, dituangkan dalam 11 (sebelas) PBI, sedangkan kebijakan untuk menciptakan industri perbankan nasional yang sehat, kuat, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai visi API dituangkan dalam 3 (tiga) PBI. Untuk 3 PBI yang terakhir, terdiri dari (1) PBI mengenai *Single Presence Policy* (SPP) atau Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia; (2) PBI yang memberikan insentif kepada bank-bank yang melakukan merger. Serta (3) PBI untuk penyempurnaan ketentuan *good corporate governance* (GCG).

Kilas balik yang penuh gejolak tersebut tidak menghalangi peranan perbankan sebagai sub sektor ekonomi yang paling sentral peranannya dalam memobilisasi dana masyarakat. Mengacu ke laporan Bank Indonesia, sampai dengan bulan Maret 2006, jumlah bank yang beroperasi di Indonesia tercatat sebanyak 131 bank umum dan 2066 BPR. Total aset perbankan nasional adalah Rp 1.465,3 triliun dengan total DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dihimpun perbankan telah mencapai Rp 1.270,6 triliun. Jumlah dana tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap perbankan sebagai alternatif investasi dan sebagai institusi penyimpanan dana.

6.2. Program Strategis Bank Indonesia

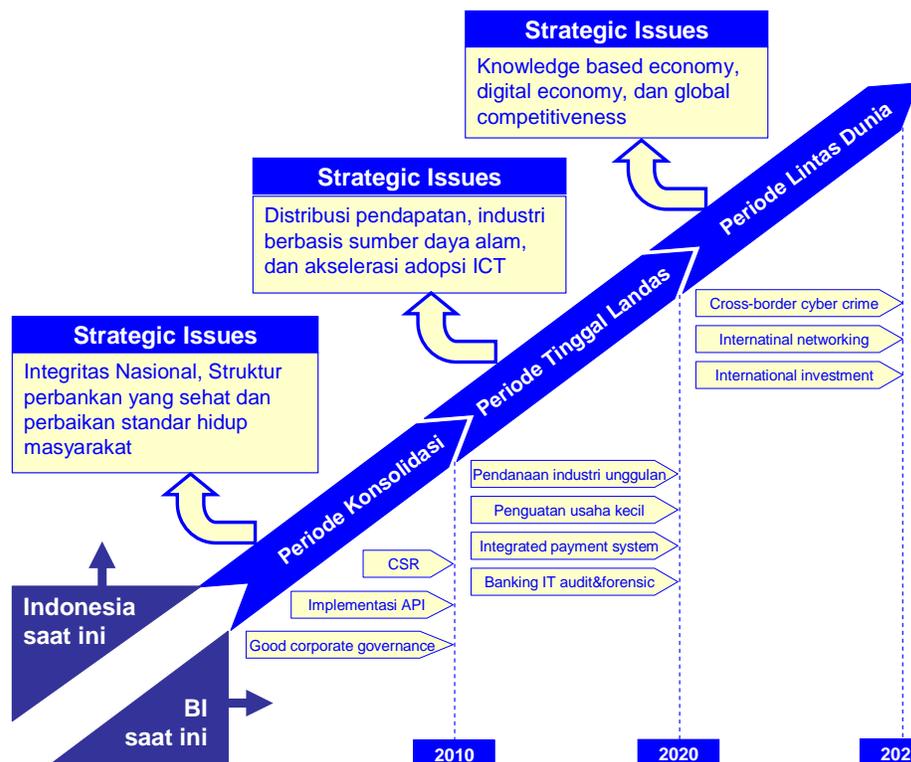
Berdasarkan kilas balik tersebut, posisi Indonesia saat ini, berbagai skenario globalisasi pada tahun 2025, dan visi Indonesia 2025, maka Bank Indonesia memerlukan rencana strategis untuk kurun waktu 2007-2025. Berbagai pilihan strategis tersebut tentunya disesuaikan dengan tujuan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang perlu menjaga stabilitas nilai rupiah yang sangat rentan terhadap perkembangan situasi global. Selain itu, program strategis Bank Indonesia harus disesuaikan dengan program strategis pemerintah sebagai payungnya. Hal ini sesuai dengan UU perbankan nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank Indonesia sebenarnya sudah mempunyai rencana strategis sendiri yang tertuang dalam *strategy map* Bank Indonesia, tetapi peta strategi tersebut hanya sampai tahun 2008 seperti disajikan dalam gambar di bawah ini. Penulis menyarankan perbaikan strategi BI dalam menghadapi Indonesia 2025, yang lebih diarahkan pada peningkatan peran BI yang tidak sebatas BI secara internal tetapi bagaimana perbankan nasional siap bersaing di lingkungan global



Mencermati peta strategi BI sampai tahun 2008 di atas, penulis menyarankan penambahan dan perluasan *action plan* dalam kurun waktu 2007 – 2025 yang sesuai dengan skenario, visi dan rencana strategis Indonesia 2025 yang telah disajikan di Bab 3. Salah satu aspek penting dalam penyusunan strategi tersebut adalah bagaimana menyikapi *strategic issues* di lingkungan global serta pengembangan berbagai ukuran atau indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi untuk masing-masing *action plan*. Jadi rencana strategis tidak hanya mencakup BI sendiri tetapi bagaimana *road map* perbankan nasional dalam ikut mendukung terwujudnya Indonesia 2025 yang lebih baik sesuai dengan skenario yang diharapkan yaitu “Nusantara Jaya”.

Tahap-tahap dalam horizon perencanaan strategis Bank Indonesia 2025 *versi* Penulis terdiri dari 3 periode yaitu (1) periode pertama yaitu penguatan fondasi yang mendukung Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sudah diluncurkan pada Januari 2004; (2) periode kedua yaitu tinggal landas menuju kinerja bank sentral yang sejajar dengan bank sentral di kawasan regional; serta (3) periode ketiga yaitu pemantapan fungsi dan peranan Bank Indonesia dalam memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian Indonesia yang memasuki percepatan dalam menghadapi persaingan global. Gambaran umum program strategis Bank Indonesia serta program implementasi selengkapny dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



Rencana Strategis Bank Indonesia	
Konsolidasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia 2. Penguatan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat 3. Peningkatan integritas perbankan melalui penguatan <i>good corporate governance</i> yang mendukung penguatan sistem integritas nasional 4. Program insentif terhadap penyaluran kredit untuk lembaga keuangan mikro dan usaha kecil
Tinggal Landas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan dalam menghadapi, mengantisipasi dan menangani <i>cyber-crime</i> di bidang perbankan 2. Peningkatan ketrampilan dan penggunaan <i>IT-forensic</i> dan <i>Banking IT audit</i> dalam menanggulangi kejahatan komputer perbankan 3. Implementasi sistem pembayaran elektronik nasional yang terintegrasi dengan sistem lembaga keuangan dan lembaga pemerintah lainnya
Lintas Dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi dan kebijakan bank indonesia dalam menghadapi dan mengantisipasi <i>Digital-economy</i> dan <i>Knowledge Based Economy</i> 2. Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam penanganan <i>cyber crime</i> yang lintas-negara dan <i>international electronic payment system</i> 3. Program peningkatan peran dan partisipasi perbankan nasional dalam sistem keuangan dan investasi internasional

6.3. Action Plan untuk Program Strategis Bank Indonesia Menuju 2025

a. Program Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia

Industri perbankan nasional saat ini telah memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan *policy direction* dan *policy recommendations* untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang. Keberadaan API memiliki tujuan yang sangat fundamental yaitu terciptanya struktur industri perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap bank diharapkan untuk melihat kembali kemampuan dan sumber daya masing-masing apakah mereka mempunyai tujuan jangka panjang untuk menjadi bank internasional, bank nasional, atau menjadi bank spesialis yang memiliki fokus kegiatan tertentu. Dalam rangka mendukung terwujudnya struktur perbankan yang sehat maka salah satu caranya adalah dengan memperkuat permodalan bank. Diharapkan pada awal tahun 2011 semua bank umum yang beroperasi telah memiliki modal minimum Rp 100 miliar yang merupakan kebutuhan minimum bagi bank untuk dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Penulis hanya mengutip program implementasi API berdasarkan konsep yang telah dirancang oleh Bank Indonesia, tetapi dengan menambahkan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasinya, seperti disajikan pada tabel di bawah ini. Salah satu agenda utama dalam program pengembangan struktur perbankan yang kuat adalah peningkatan peran BPD sebagai ujung tombak pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah. Salah satu *strategic option* yang bisa dipilih

adalah penggabungan BPD se-Indonesia tetapi tetap *core-business*-nya adalah mempercepat pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan dan transaksi pemerintah daerah.

Action Plan untuk Program 1		Indikator Kinerja
1.	Pengembangan struktur perbankan yang sehat	(a) Jumlah Bank Internasional sesuai Kerangka API
2.	Sistem pengaturan yang efektif	(b) Pemeriksa bank dengan sertifikasi internasional di bidang IT audit (CISA) dan (c) target waktu Implementasi <i>25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision</i>
3.	Sistem pengawasan yang independen dan efektif	(d) Persentase pengungkapan angka kejahatan perbankan,
4.	Infrastruktur pendukung yang mencukupi	(e) ketersediaan database <i>cyber crime</i> di bidang perbankan
5.	Program perlindungan konsumen	(f) Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan perbankan

Target Keberhasilan Program				Keterangan:
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	0	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya • Untuk indikator (c) didasarkan pada dugaan bahwa hampir sebagian besar kasus <i>cybercrime</i> di bidang perbankan belum banyak terungkap dan disidangkan • (f) sampai triwulan 3 (BI, 2006)
(b)	-	100	250	
(c)	-	terlaksana	terlaksana	
(d)	-	75%	90%	
(e)	-	tersedia	Data Lengkap	
(f)	66163	50000	10000	

b. Penguatan Program *Corporate Social Responsibility* perbankan nasional untuk Mengatasi Kemiskinan dan Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Bank Indonesia mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah menjadi kecenderungan global, sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang selanjutnya diatur melalui PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Selain itu, CSR terkait juga dengan pencapaian tujuan *Millenium Goals Development* (MDG). Bahkan Indonesia sendiri telah berinisiatif menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang menghasilkan Deklarasi Jakarta mengenai MDG di Asia-Pasifik pada tanggal 5 Agustus 2005. Dua tujuan pertama dari MDG adalah mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan serta menuntaskan tingkat pendidikan dasar. Sudahkah pihak perbankan nasional ikut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan MDG yang sudah menjadi komitmen global dan nasional tersebut? Pertanyaan tersebut menjadi dasar pemikiran program strategis ini dengan tujuan untuk meningkatkan peran BI dalam mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pendidikan yang masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Beberapa rencana tindakan untuk program strategis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program CSR ini dititikberatkan pada upaya perbankan nasional dalam mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, program wajib belajar, pengangguran,

atau bencana sosial dan lingkungan seperti telah disajikan pada *strategic framework* pemerintah Indonesia di bab 3. *Action plan* untuk program strategis ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

	Action Plan untuk Program 2	Indikator Kinerja
1.	Peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan dengan perguruan tinggi	(a) Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BI
2.	Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang perbankan dengan perguruan tinggi	(b) Jumlah paten di bidang perbankan dan (c) publikasi ilmiah di bidang teknologi perbankan per tahun
3.	Pemberian beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu	(d) Jumlah penerima beasiswa BI dari masyarakat miskin, (e) persentase angka kemiskinan
4.	Peningkatan peran perbankan nasional untuk penguatan <i>social safety net</i>	(f) Kelengkapan sistem informasi untuk mendukung <i>social safety net</i>

Target Keberhasilan Program				Keterangan:
Indikator	Baseline	2010	2025	
(a)	62	100	250	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya • (a) jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dalam penyaluran beasiswa • (c) berdasarkan rata-rata artikel pada buletin yang dikelola BI • (d) Jumlah penerima beasiswa sampai tahun 2006
(b)	-	20	50	
(c)	-	50	100	
(d)	2880	5000	10000	
(e)	17.5%	10%	5%	
(f)	Belum	Sebagian	Tersedia	

c. Peningkatan integritas perbankan melalui penguatan *good corporate governance* yang mendukung penguatan sistem integritas nasional di era informasi

“The National Integrity System is the sum total of the institutions and practices within a given country that address aspects of maintaining the honesty and integrity of government and private sector institutions”

Transparency International

Bank Indonesia beserta semua pelaku usaha bank di Indonesia tentunya sudah mempunyai kerangka kerja mengenai program peningkatan integritas perbankan. Dari sisi kilas balik perbankan, saat ini perbankan Indonesia sudah mulai memasuki tahap konsolidasi, setelah beberapa tahun sebelumnya memasuki tahap krisis dan tahap rehabilitasi yang telah menimbulkan *gonjang-ganjing* dalam perekonomian Indonesia. *Moga-moga* tahap konsolidasi yang ditandai dengan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia tersebut bisa menjadikan perbankan nasional menjadi lembaga yang mengedepankan integritas dalam menjalankan usahanya.

Peningkatan integritas internal sudah menjadi tanggung jawab BI yang tercermin dalam penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Dan penulis percaya bahwa Bank Indonesia akan terus memperbaiki mekanisme pengaturan dan pengawasan bank sebagai salah satu pilar utama dari tugas pokok Bank Indonesia. Tetapi integritas yang

tercermin dalam tata kelola yang baik tersebut belumlah cukup. Integritas Eksternal yang lebih ke arah tanggung jawab atau kepedulian sosial-kemasyarakatan dan perkembangan perekonomian masih memerlukan perhatian. Berbagai rasio perbankan atau kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kepedulian atau tanggung jawab bank terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Selain itu, salah satu persoalan bangsa saat ini yang sangat memerlukan perhatian adalah penanggulangan korupsi yang sudah bersifat struktural, seperti sudah dijelaskan di Bab 2 sebelumnya. Masalah tersebut menunjukkan bahwa integritas nasional masih menjadi kendala besar di tahap konsolidasi. Di sini Bank Indonesia dituntut untuk memberikan dukungan terhadap upaya penanggulangannya, minimal untuk sektor perbankan sendiri dimana Bank Indonesia menjadi otoritas regulasi yang bisa menjadi pelopor dalam penanggulangan KKN. Beberapa *action plan* untuk program ketiga ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

	Action Plan untuk Program 3	Indikator Kinerja
1.	Implementasi <i>good corporate governance</i> untuk meningkatkan integritas perbankan nasional, termasuk <i>IT Governance</i>	(a) Persentase bank yang sudah menerapkan GCG dengan baik
2.	Peningkatan profesionalisme melalui sertifikasi dan kode etik profesi bagi seluruh pegawai bank	(b) persentase karyawan bank yang memperoleh sertifikasi profesi dan (c) Persentase karyawan bank yang melanggar kode etik profesi
3.	Program promosi integritas nasional ke pihak internasional	(d) Ranking CPI Indonesia
4.	Program sosialisasi (public education) mengenai kebijakan, peraturan, etika dan hukum perbankan	(e) jumlah publikasi per tahun dan (f) jumlah penelitian mengenai peraturan dan hukum perbankan per tahun

Target Keberhasilan Program				Keterangan:
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	-	75%	95%	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya • (b) sampai saat ini baru 1892 karyawan bank yang mengikuti ujian sertifikasi manajemen resiko (BI, 2006) • (d) Ranking CPI indonesia saat ini adalah 130 • (c), (e), dan (f) adalah proyeksi penulis
(b)	-	50%	80%	
(c)	-	5%	1%	
(d)	130	50 besar	20 besar	
(e)	-	20	50	
(f)	-	10	25	

d. Program insentif terhadap penyaluran kredit untuk lembaga keuangan mikro dan usaha kecil, dan koperasi

CAMEL ratings are based only on internal operations, they measure only the current financial condition of a bank and do not take into account regional or local economic developments that may pose future problems

Federal Deposit Institution Council, Amerika Serikat

Penulis meyakini pihak Bank Indonesia sudah mengetahui dan memahami maksud kutipan di atas. Apalagi sistem penilaian kesehatan bank di Indonesia relatif sama- kalau tidak bisa dikatakan mengacu- ke sistem penilaian yang diterapkan di Amerika Serikat. Jika dikaitkan dengan tanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi, penulis berpendapat bahwa sistem penilaian kesehatan bank di Indonesia pun akhirnya kurang peka terhadap usaha-usaha bank untuk ikut memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Secara makro jelas Bank Indonesia punya mekanisme lain dalam upaya mempengaruhi perekonomian, misalnya dengan memainkan instrumen moneter. Tapi persoalannya disini adalah mungkinkah Bank Indonesia memberikan insentif lebih besar lagi kepada bank yang memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat?

Mari kita coba lihat struktur atau komponen penilaian CAMELS yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 serta ketentuan pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Semua komponen terlihat lebih mengarah pada ukuran-ukuran kinerja perusahaan secara internal, mulai dari permodalan, kekayaan, manajemen, keuntungan, dan likuiditas.

Pada sistem penilaian sebelumnya justru ada sistem insentif yang diberikan kepada bank yang memberikan kreditnya ke Usaha Kecil yaitu minimal 20% dari kredit yang disalurkan. Berdasarkan laporan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), pada tahun 2004 statistik menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil di Indonesia tercatat sebanyak 43 158 468 pelaku atau 99,8 persen dari total pelaku usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 80,9 Triliun atau sekitar 18,39 persen dari total investasi sebesar Rp 439,9 Triliun. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha kecil tercatat sebesar 70 919 385 orang atau 89,84 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di industri. Bank Indonesia mungkin punya alasan kuat untuk menghilangkan faktor penilaian tambahan tersebut pada sistem penilaian yang baru. Alasannya bisa saja karena pemberlakuan *equal treatment* terhadap semua debitur tanpa melihat kapasitas dan skala usahanya. Atau karena kesulitan pihak bank dalam menyalurkan ke usaha kecil karena masalah administrasi atau faktor risikonya?

Bank Indonesia sendiri tetap peduli terhadap kelompok usaha tersebut dengan memberikan kredit yang langsung bersumber dari Bank Indonesia dan disalurkan melalui bank-bank. Tetapi tidak adakah mekanisme atau sistem insentif tambahan yang bisa mendorong bank-bank untuk peduli terhadap pengembangan usaha kecil bahkan usaha mikro. Mengingat jumlah usaha kecil yang luar biasa besar tersebut sebaiknya pihak perbankan mulai berpaling ke mereka dengan tetap berdasarkan perhitungan bisnis yang terukur.

Dan sebagai otoritas perbankan nasional, Bank Indonesia perlu membuat perangkat peraturan yang bisa mendorong perbankan nasional untuk tetap peduli terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar terwakili oleh para pelaku usaha kecil tersebut. Penilaian kesehatan bank pun harus bisa mencerminkan kepedulian dan keberpihakan perbankan terhadap kondisi dan perkembangan sosial ekonomi nasional. *Action plan* selengkapnya untuk program ini adalah sebagai berikut:

	Action Plan untuk Program 4	Indikator Kinerja
1.	Program insentif kepada bank yang mendukung pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Indonesia	(a) Persentase kredit yang disalurkan ke usaha mikro, kecil, dan koperasi
2.	Pelatihan dan pengembangan sistem informasi usaha kecil yang berhubungan dengan sistem perbankan	(b) Persentase unit usaha yang tergabung dalam sistem informasi debitur khusus UKMK
3.	Program peningkatan pemahaman keuangan dan perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi	(c) Persentase usaha kecil yang sudah menggunakan laporan keuangan
4.	Pengembangan portal <i>e-business</i> untuk <i>small business</i> yang terintegrasi dengan sistem perbankan	(d) Jumlah anggota <i>e-business</i> untuk usaha kecil dan (e) persentase unit usaha yang sudah menggunakan TIK
5.	Program bantuan perbankan dalam pengembangan sentra industri kecil berorientasi ekspor	(f) jumlah sentra industri kecil berorientasi ekspor yang terintegrasi dengan sistem perbankan

Target Keberhasilan Program				Keterangan:
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	-	20%	40%	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya • (a) data BI tahun 2006 dan tahun 2015 seperti aturan CAMEL 1993 minimal 20% • (b), (c), (d) dan (e) adalah proyeksi penulis
(b)	-	75%	100%	
(c)	-	50%	100%	
(d)	-	1 juta	10 juta	
(e)	-	25%	90%	
(f)	-	15	100	

e. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan dalam menghadapi, mengantisipasi dan menangani *cyber-crime* di bidang perbankan

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologinya diantaranya meliputi *Automated Teller Machine, Banking Application System, Real Time Gross Settlement System, Sistem Kliring Elektronik, dan internet banking*. BI melaporkan bahwa pada tahun 2004 aktivitas kartu kredit dan ATM menunjukkan peningkatan aktivitas transaksi secara cukup berarti yaitu masing masing sebesar 34% menjadi Rp37,6 triliun dan 10% menjadi Rp417 triliun.

FFIEC (2003) mendefinisikan *e-banking* sebagai pengiriman produk dan jasa perbankan secara otomatis dan langsung ke nasabah melalui saluran komunikasi elektronik

dan interaktif. E-banking mencakup sistem yang memungkinkan nasabah lembaga keuangan, baik individu maupun perusahaan, untuk mengakses rekening, transaksi bisnis, atau memperoleh informasi mengenai produk dan jasa keuangan melalui jaringan umum atau khusus, termasuk internet. Menurut OCC (1999), Internet banking adalah sistem yang memungkinkan nasabah bank mengakses rekening dan informasi umum mengenai produk dan jasa bank melalui personal computer (PC) atau peralatan pintar lainnya.

Penggunaan teknologi sistem informasi perbankan (atau disingkat TSI Perbankan yang merupakan istilah dari Bank Indonesia) yang cepat dan meluas di perbankan nasional tentunya perlu disertai dengan aspek regulasi dan penanganan kejahatan komputer melalui TSI Perbankan. Sayangnya aspek regulasi ini selalu tertinggal. Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai cyberlaw yang sangat diperlukan untuk menangani kejahatan komputer. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik-pun masih belum jelas kapan bisa diundangkan. Perkembangan kejahatan komputer perbankan saat ini – misalnya kejahatan kartu kredit atau pembobolan situs *e-commerce* atau *e-banking* – merupakan salah satu tujuan dari *action plan* BI, yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

	Action Plan untuk Program 5	Indikator Kinerja
1.	Pembentukan pusat kajian dan penelitian cybercrime di bidang perbankan	(a) jumlah institusi, termasuk BI yang mempunyai pusat kajian khusus cybercrime dan (b) jumlah karyawan BI yang pakar cybercrime
2.	Program pendidikan dan pelatihan penanganan dan penyidikan cybercrime di bidang perbankan	(c) persentase karyawan BI dan (d) Persentase karyawan bank yang sudah mengikuti pelatihan cybercrime
3.	Penyempurnaan peraturan dan regulasi nasional mengenai e-banking yang selaras dengan cyberlaw di Indonesia	(e) pemberlakuan Cyber law yang bisa mengatasi resiko e-banking dan (f) lembaga sertifikasi e-banking

Target Keberhasilan Program				Keterangan:
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	0	5	10	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya • (a), (b), (c), (d) adalah proyeksi penulis • (e), (f): saat ini RUU Informasi dan Transaksi Elektronik baru sampai rancangan akademik
(b)	-	10	25	
(c)	-	50%	100%	
(d)	-	25%	50%	
(e)	Belum	Sebagian	Lengkap	
(f)	Tidak ada	ada	Ada	

f. Peningkatan ketrampilan dan penggunaan *IT-forensic* dan *Banking IT audit* dalam menanggulangi Resiko komputer perbankan

Seorang auditor bank tentunya tidak bisa mengabaikan penerapan TSI sebuah bank, yang mungkin melibatkan berbagai komponen atau jenis-jenis teknologi yang beragam, mulai yang masih sederhana sampai yang sangat kompleks. Penggunaan teknologi tersebut akan mengurangi atau menghilangkan jejak audit historis dalam bentuk kertas atau *hardcopy*. Hal

ini yang menjadi titik perhatian utama para auditor dalam menanggapi perkembangan TSI dan potensi resikonya yang akan mempengaruhi keamanan data atau informasi. Dengan TSI semua data atau informasi tersebut diolah dan disajikan oleh TSI melalui penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan berbagai fasilitas TSI lainnya. Penggunaan TSI tersebut cenderung mengarah ke operasi bank yang bersifat *paperless*.

Perkembangan TSI perbankan Indonesia yang sangat pesat menimbulkan berbagai implikasi, baik untuk bank itu sendiri, nasabah, otoritas moneter, atau pihak lain yang terkait. Implikasi tersebut bisa mencakup aspek penguasaan teknologi itu sendiri; kesiapan infrastruktur, misalnya biaya investasi, kebijakan manajemen dan budaya teknologi; kesiapan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam penggunaan teknologi; serta implikasi terhadap keamanan penggunaan TSI. Implikasi yang terakhirlah yang menjadi perhatian utama para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal.

Pengertian resiko, walaupun para ahli dan praktisi mempunyai definisi yang berbeda-beda, secara umum prinsipnya sama yaitu mengenai peluang atau ketidakpastian mengenai sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jika sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi maka akan menimbulkan konsekuensi yang menguntungkan (positif) atau tidak menguntungkan (negatif). Istilah resiko itu sendiri lebih banyak dikaitkan dengan pengaruh negatif, sedangkan pengaruh positif biasanya disebut kesempatan (*chance*) atau peluang (*opportunity*). Hinson (2000) menyebutkan bahwa resiko merupakan fungsi dari ancaman (*threat*), kelemahan teknologi atau sistem itu sendiri (*vulnerability*), serta dampak (*impacts*).

Program ini terkait dengan program 5 tetapi lebih ke arah teknologi atau teknis pemeriksaan, sesuai dengan tugas pokok Bank Indonesia. Salah satu program yang sangat penting adalah pemberlakuan IT audit yang tersendiri tetapi tetap terkait dengan audit keuangan. Konsepnya mengacu kepada URSIT (uniform Rating System for Information Technology) yang telah diterapkan oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

	Action Plan untuk Program 6	Indikator Kinerja
1.	Program pembentukan gugus tugas di BI yang menangani IT-forensic	(a) target waktu pembentukan gugus tugas dan (b) Jumlah ahli IT-forensic di BI
2.	Program implementasi pemeriksaan teknologi sistem informasi perbankan (banking IT rating system)	(c) Persentase bank yang masuk kategori komposit 1 untuk IT rating system dan
3.	Program sertifikasi IT auditor nasional dan internasional untuk para pemeriksa bank	(d) Jumlah IT auditor Bank Indonesia yang bersertifikasi internasional
4.	Pengembangan cetak biru atau arsitektur teknologi sistem informasi perbankan di era globalisasi	(e) tenggat waktu implementasi cetak biru
5.	Program pendidikan dan pelatihan di bidang IT forensic dan IT audit	(f) persentase karyawan BI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ini

Target Keberhasilan Program				Keterangan:
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	-	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya (c) saat ini Bank Indonesia belum menerapkan IR Rating seperti URSIT-nya The Fed (e), Cetak biru sebaiknya bukan hanya sebatas API saja tetapi juga cetak biru Indonesian Banking IT untuk menghadapi globalisasi (f) sampai tahun 2005 jumlah pegawai organik di BI tercatat 5999 orang
(b)	-	5	20	
(c)	-	10%	50%	
(d)	-	25	100	
(e)	-	Sebagian tersedia	Lengkap	
(f)	-	25%	75%	

g. Implementasi sistem pembayaran elektronik nasional yang terintegrasi dengan sistem lembaga keuangan dan lembaga pemerintah lainnya

Saat ini Bank Indonesia telah memiliki *Real Time Gross Settlement System* (BI-RTGS), sebuah sistem pembayaran elektronik antar bank atau pihak terkait bank. Tetapi sampai saat ini sistem tersebut belum mencakup semua wilayah perbankan nasional karena masalah ketersediaan fasilitas telekomunikasi. Selain itu, sistem ini belum terintegrasi dengan sistem pembayaran yang terkait dengan lembaga keuangan atau lembaga pemerintahan yang lain. Kliring Nasional pun belum diimplementasikan ke seluruh wilayah Indonesia, yang selama ini masih dilayani dengan sistem kliring elektronik atau otomasi kliring yang bersifat lokal, dalam artian belum terintegrasi dalam BI-RTGS. Kondisi itulah yang mendasari perlunya rencana strategis dalam hal sistem pembayaran elektronik nasional yang terintegrasi.

Action Plan untuk Program 7		Indikator Kinerja	
1.	Implementasi sistem pembayaran elektronik nasional untuk semua jenis transaksi perbankan	(a) target waktu kliring nasional untuk seluruh wilayah Indonesia dan (b) nilai transaksi harian BI-RTGS	
2.	Pembentukan gugus tugas lintas sektoral untuk sistem pembayaran elektronik nasional.	(c) target waktu pembentukan gugus tugas dan (d) <i>reliability performance</i> BI-RTGS	
3.	Integrasi sistem pembayaran elektronik dengan <i>e-government</i> dan sistem elektronik lainnya	(e) sistem eksternal yang terintegrasi dengan BI-RTGS	
Target Keberhasilan Program			
Indikator	Baseline	2015	2025
(a)	Sebagian	75%	100%
(b)	100 triliun	250 triliun	1000
(c)	-	Terbentuk	Terbentuk
(d)	-	95%	99%
(e)	-	2	5

Keterangan:

- Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya
- (a) saat ini Kliring nasional diproyeksikan untuk menggantikan sistem kliring saat ini di 105 lokasi
- (d) *reliability* adalah seberapa persen waktu kerja BI-RTGS tersedia dengan baik
- (e) adalah proyeksi penulis

h. Penguatan regulasi dan kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi dan mengantisipasi *Digital-economy* dan *Knowledge Based Economy*

E-Business can revolutionize the way firms do business because it involves all of firm's electronic interactions with its stakeholder

Cerullo and Cerullo (2004)

Sesuai dengan pemaparan mengenai KEI di bab 2, Indonesia bisa meningkatkan posisinya dalam pemanfaatan *knowledge based economy* jika melakukan perbaikan dalam tiga aspek. Pertama adalah masalah insentif dan rejim institusional yang meliputi hambatan tarif dan non-tarif, kualitas regulasi, serta peraturan dan perundang-undangan. Kedua, perbaikan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia mencakup *adult literacy rate*, *secondary enrollment*, dan *tertiary enrollment*. Dan terakhir masalah di bidang sistem inovasi mencakup peneliti di bidang penelitian dan pengembangan, paten yang dihasilkan, dan jumlah artikel di jurnal teknis atau ilmiah. Memang permasalahan tersebut erat kaitannya dengan isu strategis sebelumnya yaitu masalah pendidikan dan modal sumber daya manusia. Pada program strategis ini, penulis lebih menitikberatkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta berbagai bentuk inovasi di bidang perbankan yang bisa difasilitasi atau dipelopori oleh Bank Indonesia.

Jika kita menginginkan peningkatan peringkat di bidang *knowledge based economy* maka kunci utamanya adalah peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mempunyai dampak terhadap perekonomian. Jangan sampai "anekdot" mengenai istilah litbang yang "diplestkan" sebagai "sulit berkembang" menjadi kenyataan di Indonesia. Hal ini tentunya memerlukan strategi nasional di bidang penelitian dan pengembangan, termasuk peranan lembaga penelitian dan perguruan tinggi bahkan perusahaan sendiri. Penelitian dan pengembangan selama ini seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Justru pihak industri seharusnya merupakan ujung tombak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, yang bisa bermitra atau melakukan jejaring dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi.

Bank Indonesia sendiri secara internal sudah memiliki direktorat penelitian dan pengaturan perbankan, serta berbagai program bantuan beasiswa atau kegiatan penelitian untuk perguruan tinggi. Tetapi tidak ada salahnya jika ke depannya Bank Indonesia menjadi pelopor kegiatan penelitian dan pengembangan yang orientasi dan cakupan wilayah penelitiannya lebih luas lagi. Berbagai isu strategis di era globalisasi yang ada dampak atau memerlukan peranan bank dalam implementasinya perlu juga dijadikan wilayah penelitian. Salah satunya adalah penelitian di bidang teknologi perbankan atau inovasi di bidang

perbankan. Beberapa rencana tindakan untuk program implementasi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

	Action Plan untuk Program 8	Indikator Kinerja
1.	Program insentif untuk bank atau pihak terkait bank yang melakukan inovasi baru	(a) jumlah bank yang memegang paten untuk teknologi perbankan
2.	Program peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di bank umum	(b) Belanja R&D rata-rata untuk perbankan nasional
3.	Program pembiayaan untuk proyek penelitian dan pengembangan yang berorientasi paten	(c) persentase jumlah proyek yang berhasil sampai tahap komersialisasi
4.	Program peningkatan budaya penelitian untuk masyarakat perbankan	(d) rasio jumlah peneliti dibandingkan jumlah penduduk Indonesia
5.	Program pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan perekonomian	(e) jumlah rata-rata publikasi internasional per tahun mengenai perbankan Indonesia dan (f) Ranking <i>KEI</i> Indonesia

Target Keberhasilan Program				Keterangan:
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	-	2	5	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda – menunjukkan penulis belum memperoleh datanya • (d) dan (f) berdasarkan acuan rata-rata <i>KEI</i> untuk negara maju • Target indikator lainnya adalah proyeksi penulis
(b)	-	10%	20%	
(c)	-	90	100%	
(d)	-	5%	10%	
(e)	-	20	50	
(f)	93	50	20	

i. Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam penanganan *cyber crime* yang lintas-negara dan *international electronic payment system*

Selama ini lalu media pembayaran elektronik dikuasai oleh para *network provider* asing seperti Visa atau Master Card. Kondisi ini bukan berarti kita menolak kehadiran mereka. Padahal peluang untuk mengembangkan sistem pembayaran elektronik yang khas dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia masih mungkin untuk digarap Berdasarkan jumlah kartu (bukan jumlah pemakai), hingga saat ini di Indonesia diperkirakan telah diterbitkan 23 juta kartu ATM, 13 juta kartu debit, dan empat juta kartu kredit. Dan baru pada tanggal 28 Desember 2004 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha alat pembayaran menggunakan kartu tersebut.

Penerapan media pembayaran elektronik ini tidak harus diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas. Masih begitu banyak transaksi "kecil-kecil" yang bisa digarap. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas belum terjangkau semuanya oleh fasilitas sistem pembayaran elektronik karena keterbatasan fasilitas telekomunikasi data. Jika seluruh wilayah Indonesia sudah bisa dijangkau oleh sistem pembayaran elektronik nasional yang dikelola oleh provider nasional maka sistem tersebut merupakan sebuah sistem yang luar biasa besar, baik dilihat

dari jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ukuran tersebut merupakan nilai jual dalam menjajagi kerja sama regional atau internasional dalam sistem pembayaran elektronik. Langkah tersebut merupakan langkah menuju era globalisasi di bidang sistem pembayaran elektronik.

Sistem pembayaran elektronik berskala internasional saat ini masih didominasi oleh fedwire (US-RTGS) yang tersambung secara online ke 7800 institusi dengan nilai transaksi pada tahun 2000 tercatat sebesar US\$ 380 triliun atau 11 kali *World Economic Product*; serta TARGET (Trans-European Automated Realtime Grosssettlement Express Transfer System) yang nilai transaksi hariannya mencapai 1,9 triliun Euro dengan 296,306 pembayaran (European Central Bank, 2006). Sedangkan nilai penyelesaian transaksi yang dilakukan melalui sistem BI-RTGS sepanjang triwulan III-2006 menunjukkan nilai rata-rata harian (RRH) sebesar Rp.117,9 triliun dan RRH volume sebanyak 29.387 transaksi (BI, 2006).

Memang dalam jangka sampai tahun 2025 kita harus realistis bahwa BI-RTGS belum bisa menyamai Fedwire atau TARGET, tetapi tidak ada salahnya Bank Indonesia bisa mempunyai orientasi tentang bagaimana BI-RTGS bersama sistem pembayaran elektronik nasional lainnya bisa mempunyai peranan yang lebih besar lagi dalam mendukung kegiatan transaksi internasional.

Program ini sangat tergantung pada apakah kegiatan ekonomi penduduk Indonesia baik individu maupun perusahaan sudah melewati batas negara. Jika lalu lintas pembayaran atas nama kepentingan individu dan perusahaan nasional sudah mengglobal seiring perkembangan perekonomian, maka kerja sama pengembangan jaringan pembayaran elektronik nasional dengan negara-negara lain merupakan salah satu program strategis Bank Indonesia menuju tahun 2025. Alangkah bangganya jika sistem atau media pembayaran elektronik "made in Indonesia" bisa diterima di negara-negara lain. Orientasi itulah yang harus bisa tercapai dalam program strategis ini.

Salah satu sub sistem pembayaran yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam skala internasional adalah *islamic banking fund transfer system*. Potensi tersebut bisa dilihat dari perkembangan bank syariah (termasuk unit syariah yang dibuka bank umum) yang terus meningkat di Indonesia. BI melaporkan sampai Agustus 2006 tercatat 604 jumlah kantor syariah dengan total aset sebesar 23,58 triliun rupiah. Dengan sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, Indonesia mempunyai "bargaining position" yang relatif kuat untuk memelopori sistem tersebut. Tetapi prinsip yang harus dipertahankan disini adalah sistem tersebut bukan bersifat eksklusif atau berdiri sendiri. Sistem tersebut tetap sebagai sub sistem

dari sistem pembayaran nasional, dan hanya sebagai "varian" atau pilihan untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat Indonesia yang penuh dengan "kebhinekaan".

Tetapi di sisi lain, terintegrasinya sistem pembayaran elektronik nasional, regional, dan internasional akan meningkatkan resikonya, termasuk disini adalah potensi kejahatan perbankan dengan memanfaatkan kelemahan sistem pembayaran elektronik yang melewati batas negara. Di era teknologi informasi dan komunikasi ini, obyek dan subyek kejahatan bisa berada dalam jarak yang relatif jauh. Bisa saja sebuah e-banking pada bank di Indonesia dibobol oleh seseorang yang berada jauh di luar negeri. Atau sama seperti tuduhan para pelaku bisnis asing bahwa oknum-oknum di Indonesia banyak melakukan "pencurian" beberapa situs e-commerce yang berada di luar negeri. Gambaran bentuk kejahatan tersebut di atas tentunya memerlukan kerja sama antar negara dalam penyidikan, pembuktian, dan tindakan hukumnya. Semua itu merupakan gambaran *action plan* untuk program strategis yang ke-9, yang rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

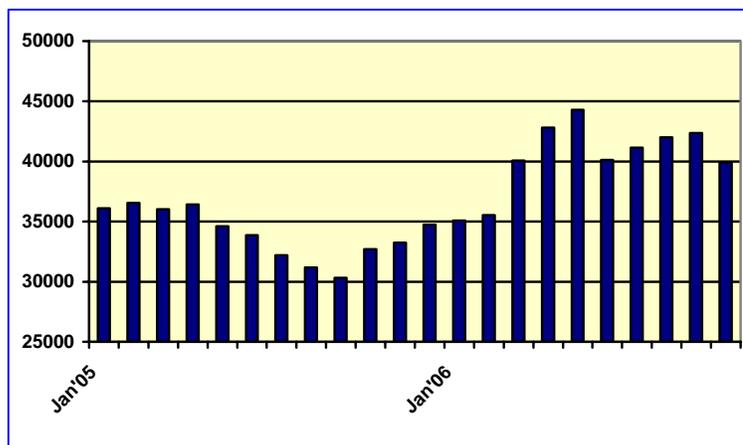
	Action Plan untuk Program 9	Indikator Kinerja
1.	Program pengembangan sistem atau media pembayaran elektronik nasional yang "go internasional"	(a) jumlah pengguna kartu kredit dan (b) jumlah pengguna kartu kredit "made in nasional"
2.	Program pengembangan sistem pembayaran elektronik syariah yang berskala internasional	(c) jumlah pengguna kartu plastik syariah dan (d) jumlah kerjasama kartu syariah dengan negara lain
3.	Program kerja sama regulasi dan penyidikan cyber crime di bidang perbankan yang melewati batas negara	(e) jumlah negara yang bekerja sama dan (f) non-performing load kartu kredit

Target Keberhasilan Program				Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> Tanda – menunjukkan data tidak tersedia atau penulis belum memperoleh datanya (d), (e) kerja sama penggunaan kartu syariah juga mencakup kerja sama cybercrime-nya (f) NPL kartu kredit saat ini sudah melampaui batasan BI sebesar 5%
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	-	10 juta	20 juta	
(b)	-	5 juta	25 juta	
(c)	-	0,5 juta	10 juta	
(d)	-	5	15	
(e)	-	5	15	
(f)	-	3%	1%	

j. Program peningkatan peran dan partisipasi perbankan nasional dalam sistem keuangan dan kegiatan investasi internasional

Cadangan devisa Indonesia yang dikelola Bank Indonesia pada akhir Oktober 2006 tercatat sebesar US\$ 39,895 Milyar. Perkembangan cadangan devisa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir bisa dilihat pada grafik di bawah. Titik terendah dalam periode tersebut tercatat pada bulan September 2005 sebesar US\$30,318 Milyar sedangkan angkat tertinggi pada bulan Mei 2006 yang tercatat sebesar US\$ 44,293 Milyar. Apabila memperhitungkan rencana percepatan pembayaran kepada IMF (50% dari sisa pinjaman IMF) sebesar USD3,6 miliar,

diperkirakan cadangan devisa pada akhir triwulan II-2006 mencapai sebesar USD40,1 miliar. Nilai ini di atau setara dengan 4,5 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah (BI, 2006). Salah satu pretasi yang perlu dicatat adalah Bank Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia pada 12 Oktober 2006 secara efektif telah melunasi seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim *Extended Fund Facility* (EFF). Pelunasan sebesar SDR 2.153.915.825, atau ekuivalen US\$ 3,181,742,918 merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010.



Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Jadi cadangan devisa yang relatif kecil dibandingkan negara lain

menunjukkan bahwa transaksi internasional Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain. Mohanty and Turner dalam BIS quarterly Review September 2006 menyebutkan bahwa total cadangan devisa di wilayah Asia per Juli 2006 tercatat sebesar US\$ 2025 Milyar dan Cina tercatat yang paling besar yaitu US\$ 941 Milyar. Jadi dengan nilai cadangan pada bulan Juli 2006 sebesar US\$ 41,125 Milyar maka porsi cadangan Indonesia sendiri hanya sebesar 2.03 persen dari total cadangan devisa Asia. Dengan ukuran cadangan devisa sekecil itu, Indonesia harus bekerja sangat keras jika ingin menjadi raksasa baru di Asia pada tahun 2025.

Masalah lainnya adalah peranan bank-bank umum di Indonesia dalam kegiatan transaksi internasional. Jika mengacu ke target Bank Indonesia menurut kerangka API, Indonesia ditargetkan memiliki 2 sampai 3 buah bank internasional pada tahun 2010. Dengan demikian, rencana strategis sampai tahun 2025 lebih dititikberatkan bagaimana bank-bank internasional tersebut semakin banyak jumlahnya, dan yang lebih penting lagi bagaimana volume transaksi internasional tersebut semakin meningkat.

Masalah lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah hutang luar negeri Indonesia yang sampai tahun 2006 tercatat sekitar US\$ 134 Milyar. Pengurangan hutang luar negeri perlu dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa.

Sampai april tahun 2005, tercatat 4 buah bank yang tergolong bank nasional dan tidak ada bank internasional menurut kerangka API yaitu yang memiliki modal di atas 50 triliun.

Mudah-mudahan dengan adanya *Single Presence Policy* yang dikeluarkan oleh bank Indonesia serta kebijakan terkait lainnya maka di tahun-tahun mendatang jumlah bank "kelas" internasional bisa terbentuk sesuai dengan indikator kinerja mengenai API. Memang memerlukan kerja keras untuk mencapai posisi tersebut di tahun 2025. Rencana aksi beserta indikator kinerja selengkapnyanya yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut.

	Action Plan untuk Program 10	Indikator Kinerja
1.	(a) Program peningkatan transaksi internasional	(a) surplus transaksi berjalan dan (b) cadangan devisa
2.	(b) Program peningkatan kinerja bank kelas internasional (kerangka API)	(c) Rata-rata aset bank kelas internasional (d) Jumlah kantor cabang bank kelas internasional di luar negeri
3.	(c) Program pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri	(e) hutang luar negeri Indonesia

Target Keberhasilan Program				<u>Keterangan:</u>
Indikator	Baseline	2015	2025	
(a)	0,9	5	10	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda – menunjukkan data tidak tersedia atau penulis belum memperoleh datanya • (a) data tahun 2005, dalam Milyar dolar • (b) per oktober 2006 (dalam US\$) • (c) dalam triliun rupiah • (d) dalam milyar dolar AS
(b)	40 Milyar	75 Milyar	150 Miliar	
(c)	-	750	1000	
(d)	-	25	50	
(e)	134	100	50	

PENUTUP

Ekacita Pancabakti 2025 pada prinsipnya merupakan tekad bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di tahun 2025. Indonesia yang berkibar di lingkungan dunia atau tercapainya "Nusantara Jaya" sebagai salah satu skenario yang kita idam-idamkan bersama. Skenario lain- yaitu prahara dan sengsara – mungkin saja yang kita alami nanti jika semua pelaku ekonomi- baik pemerintah, swasta maupun masyarakat – tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan yang tinggi dalam memberikan peran dan sumbangsihnya dalam membangun bangsa dan negara.

Rencana strategis pemerintah Indonesia didasarkan pada kondisi Indonesia saat ini dalam lingkungan global – yang masih mengkhawatirkan dilihat dari berbagai indikator- serta posisi yang diinginkan di masa depan. Rencana strategis yang disebut pancabakti tersebut adalah (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengurangan angka kemiskinan, ketidakadilan dan ketimpangan distribusi pendapatan; (2) Meningkatkan efektifitas pemerintahan melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, transparan, dan berakuntabilitas dalam mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan

demokratis; (3) Meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan melalui pemulihan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang berkelanjutan; (4) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang menguasai pengetahuan, teknologi, dan informasi dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa; dan (5) Memperkuat sistem ekonomi yang menyeimbangkan antara industrialisasi yang berbasis keunggulan sumber daya alam dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis otonomi daerah dan kearifan lokal.

Salah satu pelaku utama yang mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan Indonesia 2025 adalah Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter dan perbankan, Bank Indonesia diharapkan bisa mengemban amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Program strategis Bank Indonesia tersebut terdiri dari tiga periode yaitu (1) periode pertama, penguatan fondasi yang mendukung keberhasilan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia; (2) periode kedua, periode tinggal landas menuju kinerja bank sentral yang sejajar dengan bank sentral di kawasan regional; serta (3) periode ketiga, periode pematangan fungsi dan peranan Bank Indonesia dalam memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian Indonesia sehingga termasuk negara maju di tahun 2025 dengan tetap berpijak pada jati diri dan identitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bank Indonesia, Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan, 2006
2. Biro Pusat Statistik, 2006, Beberapa Indikator Sosio-Ekonomi, Edisi Juli 2006.
3. Bank Indonesia, Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2005, <http://www.bi.go.id>
4. Cerullo, M.J and V. Cerullo, The Auditor's Role In Securing E-Business System, EDPACS; Jun 2004; 31; 12; ABI/INFORM pg. 1, 2004.
5. Deardorff, A.V and R. M. Stern, What the Public Should Know about Globalization and the World Trade Organization, Research Seminar In International Economics, University of Michigan, 2000.
6. Economist Intelligence Unit, E-Readiness Divide Narrows, 2006
7. Esty, D.C. and M. Ivanova, Globalization and Environmental Protection: a Global Governance Perspective, Working Paper No. 0402, Yale center for Environmental Law and Policy, 2004
8. European Central Bank., Target Annual Report 2005.
9. Federal Financial Institutions Examination Council, E-Banking: IT Examination Handbook, 2003.
10. Forest Watch Indonesia, Global Forest Watch dan World Resources Institute, The State of the Forest: Indonesia, 2002
11. Glenn, J.C. and T. J. Gordon, Future S&T Management Policy Issues -- 2025 Global Scenarios, AC/UNU Millennium Project.

12. Glenn, J.C., *The World in 2025*, The Globalist, 2001.
13. Glenn, J, *Global Scenarios and Implications for Constructing Future Livestock Scenarios*, The International Livestock Research Institute and the Food and Agriculture Organization, 2006.
14. Hinson, Gary. *A Practical Model for Risk Assessment and Prioritization*.
15. International Monetary Fund, *Globalization: Threat or Opportunity?*, Issues Brief, 2000.
16. International Telecommunication Union, <http://www.itu.int>
17. 2025: A Globalization Odyssey, <http://www.wfu.edu/users/loudjr03/Globlization/Paper1.html>
18. Mohanty, M S dan P. Turner, *Foreign exchange reserve accumulation in emerging markets: what are the domestic implications?*, BIS Quarterly Review, September 2006.
19. Organisation For Economic Co-Operation And Development, *The Knowledge-Based Economy*, 1996.
20. Rosegrant, M.W, X. Cai, and S.A. Cline, *World Water and Food to 2025: Dealing with Scarcity*, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., 2002.
21. Shang-Jin Wei, *Corruption and Globalization*, Policy Brief, The Brooking Institute, Washington, 2001.
22. Shell International Limited, *The future business environment: trends, trade-offs and choices*, The Shell Global Scenarios to 2025, 2005.
23. Transparency International, *Transparency International Corruption Perceptions Index 2006*.
24. United Nations, 2006, *The Millennium Development Goals Report*.
25. United Nations ESCAP, UNDP, and ADB, 2006, *The Millennium Development Goals: Progress in Asia and Pacific*.
26. World bank group, *Knowledge Economy index*, <http://web.worldbank.org/>
27. World Bank, *Information and Communication Technology at a Glance*, Worldbank Report, 2002
28. World Economic Forum, *Global Competitiveness Report*, 2006.
29. World Economic Forum, *Global Information Technology Report*, 2006.
30. World Economic Forum, *China and the World: Scenarios to 2025*, Executive Summary, 2006.
31. World Economic Forum, 2006, *India and the World: Scenarios to 2025*, Executive Summary.
32. World Economic Outlook 2006: *Globalization and Inflation*. International Monetay Fund, 2006.